

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 16, 17 dan 25 Juni 2020



TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA (I)

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

APBD TAHUN ANGGARAN 2019

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2020
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Penutup.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 6 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 6 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 8 orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: 8 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 5 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 6 orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: 1 orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang, dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2020 kita dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dengan keadaan sehat wal'afiat. Dan semoga atas ridlo-Nya pula, rapat paripurna DPRD hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Amiin.

Peserta rapat yang kami hormati,

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 114 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, bahwa rapat paripurna untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD.

Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 42 orang. Dengan demikian kuorum rapat paripurna hari ini telah terpenuhi.

Selanjutnya, dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.30 WIB, maka Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Peserta rapat yang kami hormati,

Terlebih dahulu akan kami sampaikan kronologi pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 11 Juni 2020 telah kami terima buku-buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dari Pemerintah Kabupaten Rembang, melalui surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor : 900/1191/2020 Tanggal 10 Juni 2020 Perihal Pengiriman Buku Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Pengantar Nota Keuangan, Rancangan Perda, Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran, Lampiran Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran, dan Catatan atas laporan keuangan daerah 2019 audit dari BPK.
- Pada tanggal 11 Juni 2020 telah kami terima pula permohonan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 oleh Saudara Bupati, melalui surat Nomor : 900/1192/2020 tanggal 10 Juni 2020 perihal Pengiriman Raperda.

Peserta rapat yang berbahagia.

Dengan disampaikannya Penjelasan Raperda oleh Bupati, maka selesai sudah acara rapat paripurna pada hari ini. Dari penjelasan ini selanjutnya akan ditindak lanjuti oleh Fraksi-Fraksi dengan menyampaikan pandangan umum , dan akan disampaikan dalam rapat paripurna ke dua besok Rabu tanggal 17 Juni 2020.

Akhirnya, dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 12.41 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.


(Ketuk palu 3 kali)

Sekian

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,


H. MAJID KAMIL MZ

 SEKRETARIS,


Drs. DRUPODO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670421 199303 1 009

- Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 15 Juni 2020 dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang, dengan hasil telah ditetapkannya jadwal pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, dan rapat paripurna hari ini merupakan rapat paripurna pertama dari tiga rapat paripurna yang diagendakan.

Peserta rapat yang kami hormati.

Sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD dan TAPD tanggal 15 Juni 2020 dengan merujuk Pasal 11 ayat (3) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada rapat paripurna ini, yaitu sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Penutup.

Peserta rapat yang berbahagia.

Selanjutnya marilah kita masuki acara kedua yaitu Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Kepada Saudara Bupati Rembang, dipersilahkan.

===== PENJELASAN BUPATI =====

➤ (*Penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Terima kasih Sdr. Bupati atas penjelasannya.

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (I) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,
Forum koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan
Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pengantar Nota Keuangan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2019;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

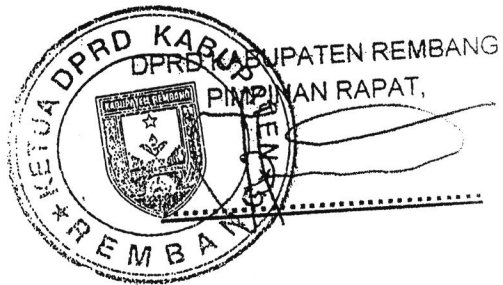
HARI/TANGGAL : SELASA, 16 JUNI 2020
PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota	3	
4	SUMARDI	Anggota	4	
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota	6	
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota	7	
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	ABDUL ROUF	Anggota	10	
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD	11	
12	MAHMUDI	Anggota	12	
13	ILYAS	Anggota	13	
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota	14	
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota	15	
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota	16	
17	SUPADI	Anggota	17	
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota	18	
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD	19	
20	SUSTIYONO	Anggota	20	
21	FRIDA IRIANI	Anggota	21	
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota	22	
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota	23	
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota	24	
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota	25	
26	SAHNINGSIH S F	Anggota	26	

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

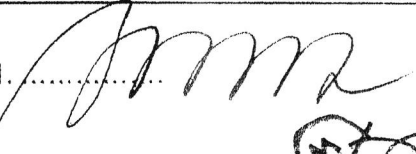
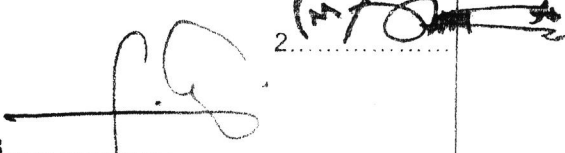
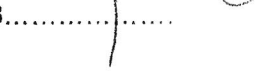
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



**DAFTAR HADIR FORKOMPINDA
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

HARI/TANGGAL : SELASA, 16 JUNI 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	3. 


SEKRETARIS DRRD KAB. REMBANG



**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (I) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

**HARI/TANGGAL : SELASA, 16 JUNI 2020
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekretaris Daerah	1.
2	Asisten I Sekda	2.
3	Asisten II Sekda	3.
4	Muntaha	Asisten III Sekda	4.
5	Dwi Rahmi	Ka. BPPKAD	5.
6	MUSTAR	Ka. BAPPEDA	6.
7	Tri Hanjani	Kabag. Hukum Setda	7.
8	Wahyudin P	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8.
9	NURPURDANA	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9.

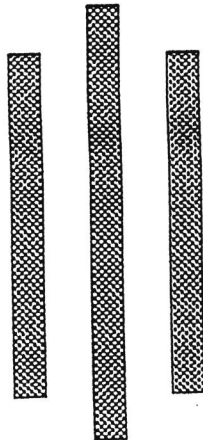
SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Drs. DRUPODO, M.Si
 M P N 19670421 199303 1 009



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR
NOTA KEUANGAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG



TAHUN ANGGARAN 2019



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yth. Saudara Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yth. Saudara Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, marilah terlebih dahulu kita menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sehingga di situasi pandemi wabah *Covid 19* ini, kita dapat bertemu dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kita dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp1.871.420.964.071,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.821.899.884.311,31 atau 97,35%. Untuk Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja dan Transfer, dari yang direncanakan untuk Belanja sebesar Rp1.539.885.242.011,19

direalisasikan sebesar Rp1.463.905.411.510,13 dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp400.359.984.600,00 direalisasikan sebesar Rp399.597.416.600,00. Sehingga Belanja Daerah yang merupakan total Belanja dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp1.940.245.226.611,19 direalisasikan Rp1.863.502.828.110,13 atau 96,04%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp155.692.630.540,19 realisasinya sebesar Rp153.281.669.305,62 atau 98,45% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp86.868.368.000,00 realisasinya sebesar Rp71.534.929.690,00 atau 82,35%

Berikut ini kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019 :

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
4	PENDAPATAN - LRA	1.871.420.964.071,00	1.821.899.884.311,31	97,35
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	310.601.592.071,00	308.445.489.137,31	99,31
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	100.522.250.000,00	100.695.231.898,00	100,17
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	24.102.329.000,00	19.033.999.790,00	78,97
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	10.840.309.000,00	10.840.310.633,00	100,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	175.136.704.071,00	177.875.946.816,31	101,56
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	1.494.475.732.000,00	1.446.671.520.332,00	96,80
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	1.094.799.320.000,00	1.051.964.945.792,00	96,09
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	26.359.122.000,00	14.575.488.939,00	55,30
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	24.475.047.000,00	24.203.659.352,00	98,89
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	799.760.392.000,00	799.760.392.000,00	100,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	244.204.759.000,00	213.425.405.501,00	87,40
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	258.436.412.000,00	258.436.412.000,00	100,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	258.436.412.000,00	258.436.412.000,00	100,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	106.030.000.000,00	107.361.335.445,00	101,26
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	106.030.000.000,00	107.361.335.445,00	101,26
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	35.210.000.000,00	28.908.827.095,00	82,10
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	35.210.000.000,00	28.908.827.095,00	82,10
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	66.343.640.000,00	66.782.874.842,00	100,66
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	66.343.640.000,00	66.782.874.842,00	100,66
5	BELANJA	1.539.885.242.011,19	1.463.905.411.510,13	95,07
5.1	BELANJA OPERASI	1.293.312.113.033,19	1.256.833.982.131,13	97,18
5.1.1	Belanja Pegawai	873.928.686.963,19	864.955.801.062,00	98,97
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353.923.542.070,00	331.305.451.674,13	93,61
5.1.3	Belanja Bunga	1.631.632.000,00	1.964.064.583,00	120,37
5.1.5	Belanja Hibah	55.583.592.000,00	50.515.064.812,00	90,88
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8.244.660.000,00	8.093.600.000,00	98,17

Kode Rek	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
5.2	BELANJA MODAL	245.296.264.355,00	207.071.429.379,00	84,42
5.2.1	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	98.401.650,00	98,40
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.027.610.842,00	43.776.934.562,00	87,51
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.802.081.598,00	64.811.957.755,00	84,39
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	112.905.178.150,00	93.210.098.837,00	82,56
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.461.393.765,00	5.174.036.575,00	94,74
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.276.864.623,00	0,00	0,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	1.276.864.623,00	0,00	0,00
6	TRANSFER	400.359.984.600,00	399.597.416.600,00	99,81
6.1	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	11.984.474.900,00	11.944.474.900,00	99,67
6.1.1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.628.625.000,00	9.628.625.000,00	100,00
6.1.2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.355.849.900,00	2.315.849.900,00	98,30
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	388.375.509.700,00	387.652.941.700,00	99,81
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	387.284.553.700,00	386.614.553.700,00	99,83
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.090.956.000,00	1.038.388.000,00	95,18
	SURPLUS / (DEFISIT)	(68.824.262.540,19)	(41.602.943.798,82)	60,45
7	PEMBIAYAAN			
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	155.692.630.540,19	153.281.669.305,62	98,45
7.1.1	Penggunaan SILPA	75.692.630.540,19	75.415.765.915,62	99,63
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	80.000.000.000,00	77.865.903.390,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	86.868.368.000,00	71.534.929.690,00	82,35
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	83.868.368.000,00	68.534.929.690,00	81,72
7.2.7	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	68.824.262.540,19	81.746.739.615,62	118,78
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	40.143.795.816,80	0,00

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan secara garis besar yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang

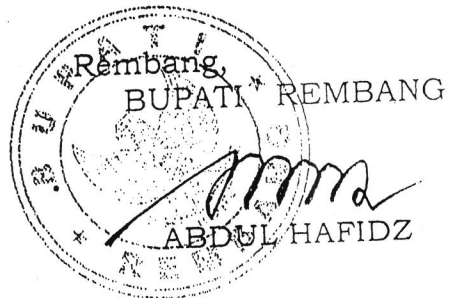
semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat, dan harus dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam rangka membangun Kabupaten Rembang dan situasi pandemi wabah Covid19 ini dapat segera reda di Negara kita Indonesia, khususnya di Kabupaten Rembang.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb.





BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PENYAMPAIAN PENGANTAR NOTA KEUANGAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Tanggal, 16 Juni 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Rembang ;
- Ykh. - Para Asisten Sekda dan Kepala OPD se
Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur ***Alhamdulillah*** kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka **“Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta jajaran eksekutif atas dukungan dan kerjasama yang baik selama ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai.

Oleh karena itu pada setiap setelah akhir Tahun Anggaran kami menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang telah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan tahap akhir dari pada siklus anggaran yang memuat data realisasi pelaksanaan anggaran sebagai cerminan dari hasil-hasil yang telah dicapai dan sekaligus memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 .

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan ini merupakan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagai kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dalam pasal 194 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan dalam kesempatan ini pula, saya sampaikan sebuah kabar yang sangat membahagiakan, membanggakan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang, karena di penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 kita dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kedua kalinya.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Selanjutnya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang dapat kami jelaskan sebagai berikut.

Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp.1.871.420.964.071,00 (*Satu triliun delapan ratus tujuh puluh satu milyar empat ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah*) dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.821.899.884.311,31 (*Satu triliun delapan ratus dua puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sebelas koma tiga puluh satu rupiah*) atau 97,35%.

Untuk Belanja Daerah yang terdiri atas Belanja dan Transfer dari yang direncanakan untuk belanja sebesar Rp. 1.539.885.242.011,19 (*Satu triliun lima ratus tiga puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu sebelas koma sembilan belas rupiah*) direalisasikan sebesar Rp. 1.463.905.411.510,13 (*Satu triliun empat ratus enam puluh tiga milyar sembilan ratus lima juta empat ratus sebelas ribu lima ratus sepuluh koma tiga belas rupiah*) dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp. 400.359.984.600,00 (*Empat ratus milyar tiga ratus*

lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu enam ratus rupiah) direalisasikan sebesar Rp. 399.597.416.600,00 (*Tiga ratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus rupiah*).

Sehingga Belanja Daerah yang merupakan total Belanja dan Transfer dari yang direncanakan sebesar Rp. 1.940.245.226.611,19 (*Satu triliun sembilan ratus empat puluh milyar dua ratus empat puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas koma sembilan belas rupiah*) direalisasikan sebesar Rp. 1.863.502.828.110,13 (*Satu triliun delapan ratus enam puluh tiga milyar lima ratus dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu seratus sepuluh koma tiga belas rupiah*) atau 96,04%.

Sedangkan pada kelompok Pembiayaan yang terdiri atas Penerimaan Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 155.692.630.540,19 (*Seratus lima puluh lima milyar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus*

7

empat puluh koma sembilan belas rupiah) realisasinya sebesar Rp. 153.281.669.305,62 (*Seratus lima puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima koma enam puluh dua rupiah*) atau 98,45% dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan sebesar Rp. 86.868.368.000,00 (*Delapan puluh enam milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah*) realisasinya sebesar Rp. 71.534.929.690,00 (*Tujuh puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) atau 82,35%.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Berdasarkan angka-angka realisasi yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 maka terlihat bahwa pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang pada umumnya dapat berjalan lancar dan terdapat beberapa peningkatan.

Namun perlu dipahami, bahwa disamping kemajuan-kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai dan dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Rembang masih juga terdapat kekurangan-kekurangan dan hambatan yang semua itu harus dihadapi sebagai pelajaran dan tantangan demi tercapainya kesempurnaan tugas-tugas mendatang.

Oleh karenanya masih diperlukan kerja keras dengan segala kemampuan yang ada sehingga pada gilirannya dapat memberikan hasil yang lebih baik dan tahun depan kita dapat, dan harus dapat terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bersama Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini dilampirkan buku-buku Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dengan harapan untuk segera dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Demikian telah saya sampaikan Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ikhtiar dan doa agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih baik.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
R E M B A N G

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (II)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Hari : Rabu
Tanggal : 17 Juni 2019
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Skors (untuk penyusunan jawaban bupati);
4. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 4 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | : 43 orang |

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : - orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : - orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : - orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : - orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : - orang |

Jumlah

: 2 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang, dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, marilah senantiasa kita selalu bersyukur kehadiran-Nya, atas berbagai kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita kembali dapat bertemu untuk melaksanakan Rapat Paripurna Kedua dalam membahas Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Peserta rapat yang berbahagia.

Ketentuan kuorum yang berlaku dalam Rapat Paripurna Kedua hari ini, adalah sama dengan yang berlaku dalam Rapat Paripurna Pertama tanggal 16 Juni 2020 dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Adapun menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara

fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 43 orang. Dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan atas dasar jumlah fisik anggota yang hadir, maka kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 12.05 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Terdapat 2 (dua) agenda pokok dalam rapat paripurna kedua ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada rapat tanggal 15 Juni 2020, dan untuk lengkapnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Skorsing (penyusunan jawaban Bupati);
4. Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Untuk kelancaran dalam penyampaiannya, kepada juru bicara masing-masing fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdri. Siti Rizkiyah Putri Dwi Ani
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Nasirudin, S.Si.
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Yatin Abdul Zaenal
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdri. Sumarsih
5. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Anjar Krisniawan, S.T.
6. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. H. Gunasih, S.E.

Secara berurutan, dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

===== PANDANGAN UMUM FRAKSI =====

➤ (*Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaiannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Acara selanjutnya yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Namun sebelumnya perlu kita berikan waktu kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban ini. Untuk itu rapat paripurna saya skors selama 60 menit.

(Ketuk palu 1 kali)

Waktu yang diberikan kepada Saudara Bupati dalam menyusun jawaban telah habis, maka skors saya cabut, dan rapat paripurna kita lanjutkan kembali.

(Ketuk palu 1 kali)

Peserta rapat yang berbahagia..

Kita masuki acara keempat yaitu Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== JAWABAN BUPATI =====

➤ *(Jawaban Bupati atas pandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Terima kasih Saudara Bupati atas jawabannya..

Peserta rapat yang berbahagia.

Dua agenda pokok pada rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna Kedua ini. Selanjutnya Raperda ini akan dibahas baik di tingkat Banggar dengan TAPD, Komisi dengan OPD maupun di tingkat Banggar dengan Komisi. Adapun untuk rapat paripurna terakhir yaitu rapat paripurna persetujuan Raperda jatuh pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “ tepat pukul 15.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, serta mohon maaf atas segala kekurangan di dalam pelaksanaan rapat paripurna ini.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

h SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

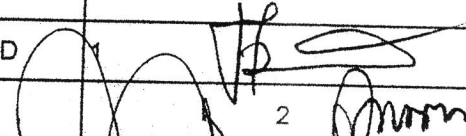
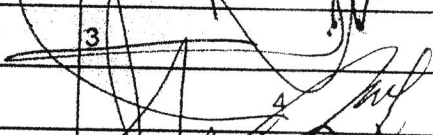
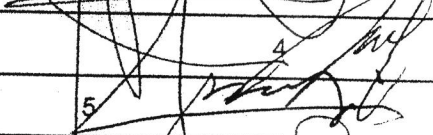
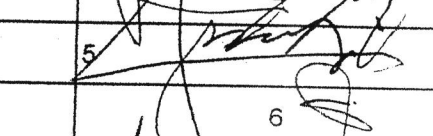
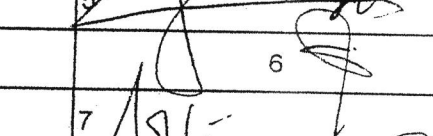
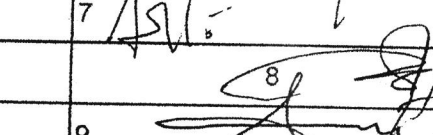
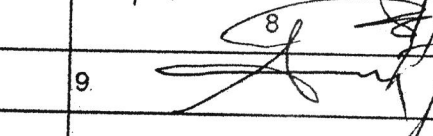
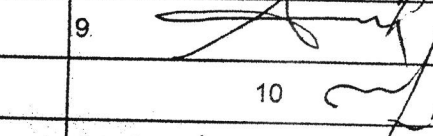
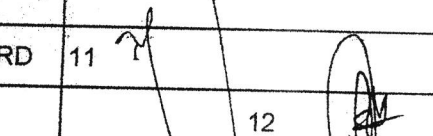
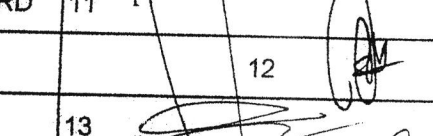
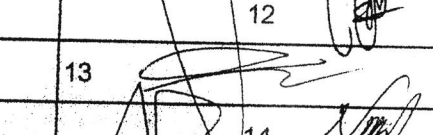
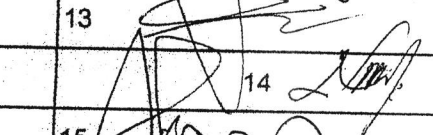
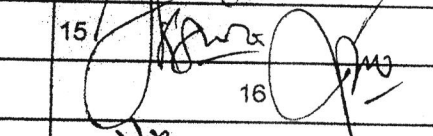
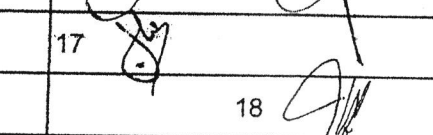
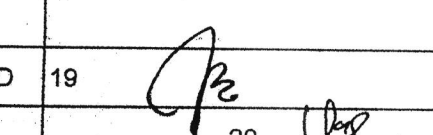
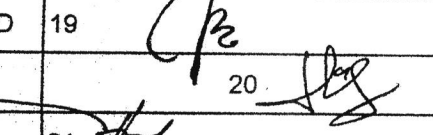
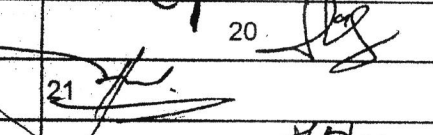
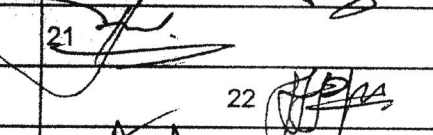
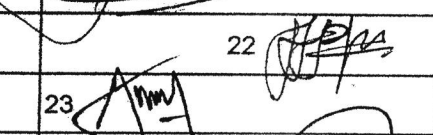
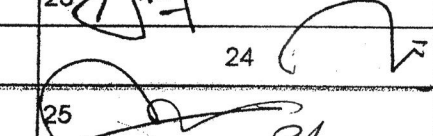
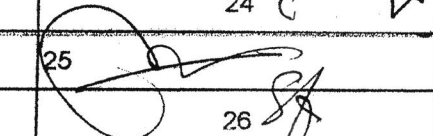
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (II) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

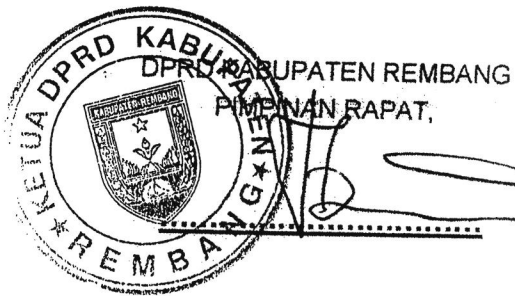
HARI/TANGGAL : RABU, 17 JUNI 2020
 PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	ABDUL ROUF	Anggota		
	FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD		
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
	FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)			
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		
26	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :



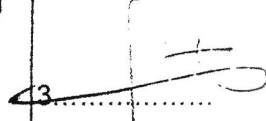
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar

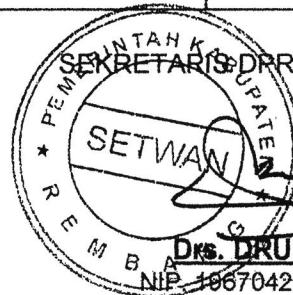


**DAFTAR HADIR BUPATI, WAKIL BUPATI REMBANG DAN Pj. SEKDA REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

HARI/TANGGAL : RABU, 17 JUNI 2020

PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	3. 



Drs. DRUPODO, M.Si

NIP. 19670421 199303 1 009

DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (II) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : RABU, 17 JUNI 2020

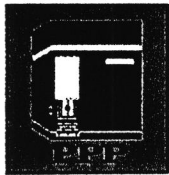
PUKUL : 10.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekretaris Daerah	1.....
2	Asisten I Sekda	2.....
3	Asisten II Sekda	3.....
4	Asisten III Sekda	4.....
5	Ka. BPPKAD	5.....
6	<i>Drs. Hary M. H.</i>	Ka. BAPPEDA	6.....
7	Kabag. Hukum Setda	7.....
8	<i>Wahyu Dian</i>	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8.....
9	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9.....

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

SETWAN

Drs. DRUPODO, M.Si
 B.N.P. 196704211993031009



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TERHADAP

RAPERDA PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

Rabu , 17 Juni 2020

Dibacakan oleh : Siti Rizqiyah Putri Dwi Ani, S.Pd.

Assalamu a'laikum Warohmatullahi wabarokatuh....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Sayyidina Wamaulana
Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

Yang kami hormati :

- => Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- => Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- => Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- => sdr. Pj. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan

para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang

=> Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf

=> Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang berbahagia.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian Pemandangan Umum ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan kepada kita, sehingga sampai saat ini, kita masih diberikan kesempatan hadir pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, para shahabat, dan seluruh keluarganya.

Pada kesempatan yang baik ini, dan masih dalam suasana bulan syawal tahun 1441 H, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan Selamat hari raya Fitri, Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan bathin atas semua kesalahan dan khilaf yang pernah ada.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang, dan segenap Sidang Dewan, yang kami Hormati...

Mengawali penyampaian Pemandangan umum kami, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun 2019, yang Nota Keuangannya telah disampaikan oleh sdr. Bupati, pada rapat paripurna I, tepatnya hari ini Selasa kemarin, tanggal 16 Juni 2020, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, yang telah bekerja keras, sehingga dari hasil Pemeriksaan audit BPK atas penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2019, berhasil mendapatkan predikat Opini WTP. Kami juga memberikan apresiasi, atas peningkatan capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 ini, yakni mencapai 96.04%, progress tersebut sudah meningkat capaiannya, dibanding dengan realisasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, yaitu hanya sebesar 94.90%. Walaupun sampai saat ini, masih banyak hal yang belum dapat memenuhi harapan masyarakat luas, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tetap selalu memberikan dorongan, dengan harapan agar, untuk capaian realisasi pelaksanaan APBD tahun berjalan ini, dapat meningkat lebih baik lagi, meskipun waktu ini disibukkan dengan adanya penanganan pandemi Covid-19, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dapat segera tercukupi.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati...,

Berkenaan dengan Raperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini , kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut :

1. Terkait dengan hasil LHP BPK atas Laporan keuangan Pemkab Rembang Tahun Anggaran 2019, bahwa dari hasil Pemeriksaan BPK tersebut, Pemkab Rembang telah berhasil mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke dua kali, meskipun masih ada catatan-catatan kekurangan dalam LHP BPK, diantaranya masih ditemukan beberapa kelemahan tentang pengendalian internal , dan juga adanya temuan tentang ketidak patuhan terhadap Peraturan perundang-undangan yang ada. Maka kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, mendorong dan meminta kepada Pemkab Rembang, agar selalu meningkatkan kinerja yang lebih serius dan melakukan langkah-langkah strategis, agar predikat opini WTP dapat dipertahankan, dan di tahun mendatang Pemkab Rembang mendapatkan penilaian yang lebih baik lagi.

2. Terkait dengan LKPJ Bupati dan LPP APBD tahun 2019 , dari hasil audit BPK , ditemukan adanya catatan penilaian LHP BPK dalam dokumen LKPJ Bupati dengan LPP APBD tahun 2019 diantaranya : ---- >>>>
 - a. Di dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, dari 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan Pemkab Rembang , rata-rata realisasi penyerapan anggarannya mencapai 92,13 %, namun masih ada yang realisasinya di bawah 90 % , yakni contoh bidang perumahan Rakyat dan Permukiman . Dari indikator yang sudah diterapkan pada Urusan Wajib Pelayanan dasar ada 25 indikator kinerja , namun hasil yang mencapai target 11 indikator , 13 indikator yang tidak berhasil , dan 1 indikator yang tidak tersedia informasi. Dari data tersebut menunjukkan bahwa, kinerja Pemkab Rembang pada Urusan wajib pelayanan dasar masih kurang memuaskan. Dan data hasil Laporan semacam ini , juga terdapat pada dokumen LKPJ , pada 18 Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar , demikian juga terdapat pada 6 bidang urusan Pilihan, dari data tersebut disimpulkan bahwa , tidak optimalnya penyerapan anggaran dan tidak tercapainya indicator target, disebabkan karena adanya perencanaan yang kurang matang , kurang jelas dan tidak terukur, dan mungkin karena lemahnya controlling yang dilakukan top level dan middle level manager dari OPD terkait. Sehubungan dengan hal tersebut kami dari F-PPP meminta agar semua kelemahan yang ada kedepan dapat diperbaiki.
 - b. Untuk selanjutnya setelah Silpa APBD Tahun anggaran 2019 sudah dipastikan , mohon agar Rancangan APBD Perubahan Tahun anggran 2020 segera diajukan untuk segera dilakukan Pembahasan.

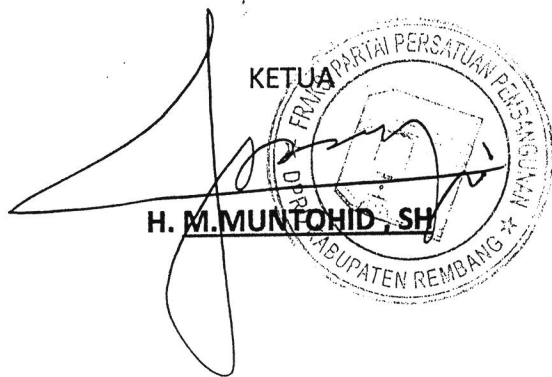
Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019. Akhirnya mari kita mohon pada ALLAH SWT, semoga kita selalu diberikan petunjuk, kemudahan dan kelancaran dalam beraktifitas , sehingga upaya dan usaha kita, mandapatkan hasil yang bermanfaat untuk masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Rembang.


Trima kasih atas segala perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh....

Rembang , 17 Juni 2020

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

H. M. MUNTOHID, SH



SEKRETARIS

H. SUNARDI, SPdi



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pemandangan Umum

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

ATAS

***RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TA. 2019***

Disampaikan oleh :

Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang
Rabu, 17 Juni 2020

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Yang kami Hormati, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati para pimpinan kesatuan TNI-POLRI, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati Para Pejabat di lingkungan Pemkab Rembang serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum FPKB ini, terlebih Dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang paripurna Penyampaian Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kab. Rembang *Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019* dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho Allah SWT. Amiin

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia

FPKB mengucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Tentu kami, FPKB menyetujui apabila Raperda ini segera di bahas melalui mekanisme rapat-rapat berikutnya di DPRD sehingga hasilnya bisa menjadi sarana evaluasi diri bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang, untuk menjadi motivasi peningkatan kualitas kinerja dan hasil kerja pada tahun- tahun yang akan datang.

Selanjutnya FPKB memberikan apresasi kepada Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang telah berhasil meraih opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA. 2019. Tentu hal ini merupakan capaian yang membanggakan dan harus di pertahankan pada masa-masa yang akan datang.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan Saudara Bupati dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 16 Juni 2020, FPKB memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Rembang yang mana berdasarkan angka-angka realisasi dan penjelasan yang tertuang dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 maka dapat

diketahui bahwa pelaksanaan APBD TA. 2019 pada umumnya dapat berjalan lancar dan penyerapan anggaran cukup tinggi. FPKB berharap semoga capaian ini bisa lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang.

Namun perlu juga kami sampaikan, menurut hemat kami jalannya pemerintahan dan APBD yang baik tidak hanya diukur dari angka-angka realisasi dan penyerapan anggaran saja. Ada banyak asas yang harus diperhatikan dan dipenuhi sebagai indikator kualitas pelaksanaan APBD seperti : ketertiban, ketaatan pada aturan perundang-undangan, efektifitas, efisiensi, ekonomisasi, transparansi, pertanggungjawaban, keadilan dan lain-lain. Maka dari itu FPKB merasa perlu memberikan catatan-catatan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Hadirin sidang paripurna yang terhormat,

Berikut ini catatan-catatan yang kami berikan atas Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2019:

1. Terkait Pendapatan asli daerah (PAD), FPKB menilai masih ada kekurangan dalam perencanaan target capaian, kurang sungguh-sungguh dalam mencapai target dan kurang mengoptimalkan potensi-potensi pendapatan yang ada. PAD yang diproyeksikan Rp. 310.601.592.071,- terealisasi Rp. 308.445.489.137 atau selisih kurang Rp. 2.156.102.933,69. Pendapatan pajak daerah yang direncanakan Rp. 100.522.250.000,00 justru terealisasi Rp. 100.695.231.100,17 persen memang bagus dari sisi capaian target namun ini juga menjadi indikasi apabila potensi-potensi sektor pajak dioptimalkan maka capaian target bisa lebih tinggi dari yang direncanakan. FPKB juga mencermati kecilnya kenaikan realisasi pendapatan pajak daerah Tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 yang hanya mengalami kenaikan sebesar Rp. 256.879.345,00 atau 0.25 persen dari realisasi Pendapatan pajak daerah TA 2018 sebesar Rp. 100.438.352.553. FPKB berharap Pemerintah Daerah lebih berani untuk menaikkan target Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran berikutnya dengan menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

2. Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah hanya tercapai 78,97 persen dari yang semula direncanakan Rp. 24.102.329.000,00 dan hanya terealisasi Rp. 19.033.999.790,- atau selisih kurang Rp. 5.068.329.210,-. FPKB sangat prihatin dengan kondisi ini. Apalagi ternyata realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA. 2019 mengalami penurunan dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah TA 2018 yang terealisasi Rp. 21.441.590.432,-. Memang kendala selalu ada namun mestinya bisa diantisipasi sebaik mungkin sehingga capaian tidak terlalu jauh dibawah target yang direncanakan.

3. Terkait belanja modal yang hanya tercapai 84.42 persen dari yang direncanakan Rp. 245.296.264.355,- hanya terealisasi Rp. 207.071.429.379,- atau selisih kurang Rp. 38.224.834.976,- tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi kami. Belanja modal yang out come nya bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan mempunyai inpact yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi seharusnya mendapatkan prioritas utama dalam realisasinya. Apalagi jika diperbandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2018 sebesar Rp. 309.448.505.895,- atau selisih kurang Rp. 102.377.076.516,- tentu ini belum mencerminkan APBD yang sehat dan ideal. FPKB berharap di kemudian hari Pemkab Rembang lebih serius dalam optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal, karena dari sinilah keberpihakan APBD pada kepentingan rakyat akan diukur.

4. Terkait belanja barang dan jasa yang realisasinya cukup tinggi dan berbanding terbalik dengan realisasi belanja modal, menurut kami perlu dievaluasi lagi terkait efektifitas dan efisiensinya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Apalagi ada lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan belanja barang dan jasa TA 2018 yang terealisasi Rp. 263.637.636.747 atau naik Rp. 67.667.814.926,93. Menurut hemat kami, belanja barang dan jasa inilah yang menyedot cukup besar anggaran untuk belanja modal.

5. Banyaknya temuan-temuan BPK atas permasalahan-permasalahan yang mengakibatkan: Kekurangan penerimaan kontribusi Pengelolaan Aset Daerah, Potensi kehilangan Pendapatan Daerah, terjadinya kelebihan pembayaran, adanya pembayaran yang tidak dapat diyakini kewajarannya, Indikasi kerugian atas kelebihan realisasi Belanja dan lain-lain menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi perencanaan maupun kelalaian oleh pejabat teknis dalam melaksanakan penggunaan anggaran. Guna mengantisipasi hal seperti ini terulang maka penyempurnaan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah mutlak diperlukan. Langkah konkrit terhadap penyempurnaan sistem ini kami harapkan menjadi prioritas pada pelaksanaan APBD berikutnya.
6. Pemberian sanksi tegas atas kelalaian pejabat teknis dalam pelaksanaan APBD menurut kami juga diperlukan sebagai peringatan agar tidak ada kelalaian atau bahkan kesengajaan yang dapat menimbulkan potensi kerugian keuangan daerah.
7. Orientasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan yang berdampak pada ekonomi harus menjadi prioritas dibanding belanja untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Untuk itu FPKB menekankan agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat harus didahulukan dan harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
8. Menyimpang dari pelaksanaan APBD 2018, dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Bupati Rembang Nomor: 800/SE/2020 tentang Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Rembang Pada Masa pandemic Covid 2019, FPKB berharap Pemkab Rembang memberikan bantuan nyata berupa fasilitas-fasilitas kesehatan kepada Pondok pesantren dan madin agar kegiatan pembelajaran tetap mematuhi standar protokol covid 19. Sosialisasi pencegahan covid 19, rapid test, swab test, thermo gun, fasilitas pembelajaran dan sarana MCK

yang memenuhi standar covid 19 dan fasilitas ruang isolasi serta biaya akomodasi sangat memerlukan campur tangan Pemkab Rembang karena keterbatasan kemampuan pondok pesantren dan madin dalam penyediaan hal-hal tersebut.

Demikian Pandangan Umum FPKB terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, akhirnya kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya,

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq

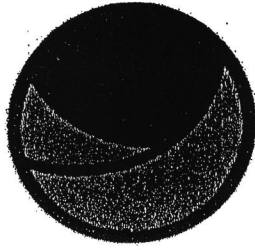
Wassalamualaikum Wr. Wb

Rembang, 17 Juni 2020
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN REMBANG


Ilyas
Ketua




Nasirudin, S.Si
Sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PEMANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua kita dapat menghadiri acara penyampaian "**Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019**" dalam keadaan sehat wal'fiat. Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. *Amin Ya Robbal Alamin.*

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Kita telah mendengar, menyimak dan membaca Pidato Pengantar Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami Fraksi NasDem menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi sebagai berikut :

1. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, ditemukan kekurangan volume atas empat paket pekerjaan tiga OPD sebesar RP. 192.774.484,89 dan denda belum disetor ke Kasda sebesar Rp. 90.515.150,00. Kedepan, kejadian tersebut jangan sampai terjadi kembali.
2. Mengenai penyaluran hibah yang melebihi ketentuan, hal ini menunjukkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kabupaten Rembang lalai dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Maka TPAD agar memedomani Perbup berkaitan dengan batasan besaran hibah.
3. Melaksanakan dengan baik dan benar atas semua rencana aksi (action plan) tindak lanjut rekomendasi BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Rembang tahun anggaran 2019 Nomor 89C/LHP/XVIII/SMG//05/2020 Tanggal 15 Mei 2020. Se jauh mana action plan yang dilakukan? MOHON PENJELASAN
4. Pendapatan asli daerah yang didapat harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat karena bagaimanapun sumber pendapatan berasal dari masyarakat.
5. Pembangunan di Kabupaten Rembang kedepannya harus berjalan lebih baik lagi, terutama dalam membangun fasilitas publik seperti jalan. Maka untuk itu perlu melakukan optimalisasi anggaran pembangunan jalan agar kondisi jalan yang sudah lama rusak atau berlubang segera teratasi.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya seluruh pihak, kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juni 2020

**FRAKSI PARTAI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

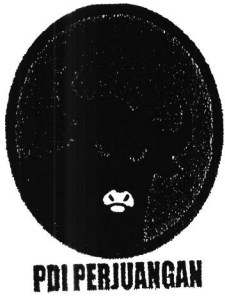
Ketua

Sekretaris



H. MASHADI, S.Pd., M.M.

FRIDA IRIANI



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PANDANGAN UMUM FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019

Hari / Tanggal : Rabu 17 Juni 2020

Dibacakan oleh : Sumarsih

Bismillahirrohmannirohim

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang ditengah situasi pandemi wabah *Covid-19* ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Pertama-tama kami dari Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas apa yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan pengelolaan asset dan keuangannya, sehingga dapat kembali mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – RI perwakilan Jawa Tengah, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Yang mana Kabupaten Rembang telah memperoleh penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berurutan dari tahun 2018, semoga ditahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Rembang dapat meningkatkan kinerjanya guna mempertahankan pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan dapat kembali meraih opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP).

Yang kedua, kami juga memberikan apresiasi atas pencapaian pendapatan Daerah yang terealisasi sebesar 96,04%. Kami harapkan untuk yang akan datang Pemerintah Kabupaten menargetkan peningkatkan pendapatan daerah. Dengan menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang belum terakomodir.

Yang ketiga, kami dari fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan kejelasan sisa anggaran Pembiayaan Netto / Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 40 M tersebut digunakan untuk apa?

Selanjutnya, apa langkah-langkah yang telah direncanakan atau sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam menghadapi persiapan New Normal?

Demikian telah kami sampaikan Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT dalam beraktivitas ditengah situasi pandemic wabah *Covid-19* ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah
Wassalamu'alaikum Wr, Wb,
Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua

JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

RABU, 17 JUNI 2020

Dibacakan oleh : H. GUNASIH, S.E.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Saudara Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini perkenankan kami mengajak hadirin semuanya Puji syukur kehadiran Allah SWT dimana kita semuanya terhindar dari Virus Covid-19 yang sedang melanda dunia kita tetap berdoa supaya Virus ini cepat musnah dari muka bumi ini. Dimana pada hari ini kita semua diberi kesehatan,

keselamatan dan berkah sehingga kita bisa hadir mengikuti persidangan yang berbahagia ini,

Bupati , Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Secara umum kami memberi Apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2019 karena menurut penilaian BPK Kabupaten Rembang berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan penyerapan anggaran sudah cukup baik akan tetapi masih juga menyisakan kurang lebih 40 M yang masih perlu digali ketidaktertibannya.

Terkait dengan program perencanaan pembangunan Rembang kedepan masih sangat minim terbukti dengan minimnya program kegiatan FS atau study misalnya : penanggulangan Abrasi pantai, bendungan besar/embung, kekurangan air bersih, kekeringan, dermaga PPI lengkap dengan kolam tambat, dan juga alun alun lasem yang sudah tidak pantas lagi. Ini menunjukkan masalah Rembang yang urgent belum dipikirkan pemerintah kabupaten.

Justru kami melihat anggaran yang sifatnya tidak penting yang ilang tanpo wujud malah sangat banyak, misalnya : peningkatan kapasitas sdm, study banding, workshop, sosialisasi, dll sehingga terkesan boros Anggaran.

Janji Bupati tahun 2018 Rembang bebas jalan berlubang sampai saat ini juga belum terwujud

Terkait dengan belanja pegawai di belanja langsung masih sangat besar sekitar 23 persen menunjukkan bahwa ASN di Kabupaten Rembang masih banyak honor honor kegiatan yang seharusnya sudah tidak diperkenankan. Karena sudah adanya TPP yang nilainya besar

Terkait pendapatan asli daerah masih banyak kebocoran kebocoran dalam hal penarikanya antara lain pajak galian tambang, retribusi TPI sedangkan sisi yang lain ada yang memberatkan pengusaha tambang yaitu terkait dengan tidak sinkron penetapan ^{konversi} tarif di provinsi dengan

kubik sedangkan pelaksanaan dilapangan dengan tonase mohon supaya di sinkronkan.

Demikianlah pandangan umum Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 17 Juni 2020

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

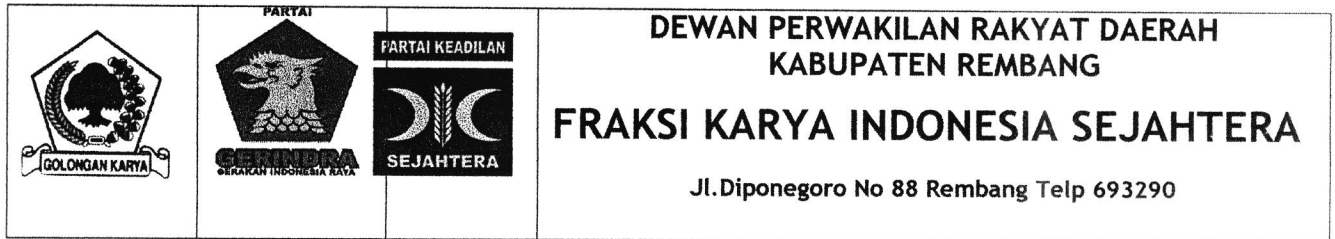
KETUA

SEKRETARIS



MUGIYARTO, S.T

DUMADIYONO, S.H.



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG

ATAS
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TA 2019

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rabu, 17 Juni 2020

Juru Bicara : ANJAR KRISNIAWAN, ST

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten Rembang, serta para hadirin semua.

Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini.

Dalam kesempatan ini kami mengungkapkan keprihatinan sangat mendalam atas situasi negara saat ini yang sedang mengalami musibah pandemi covid_19 sejak pertengahan bulan Maret yang lalu. Mudah-mudahan cobaan ini segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana seharusnya dengan tetap mentaati protokol kesehatan pencegahan covid_19 atau yang lazim disebut “new normal” yakni kehidupan normal dengan tatanan baru.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Setelah kita ikuti Pengantar Nota Keuangan Bupati tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2019 pada hari Selasa 16 Juni 2020 kemarin, tibalah saatnya kami menyampaikan Pandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera atas Raperda tsb. sebagai berikut.

- Secara umum pelaksanaan APBD 2019 telah berjalan dengan baik dan kami sangat berterima kasih terhadap semua pihak dan seluruh elemen masyarakat, jajaran pemerintahan, eksekutif maupun legislatif serta masyarakat umum yang telah bekerja sama untuk mewujudkan hal ini.

- Kami mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga pada tahun anggaran 2019 mendapat predikat WTP (wajar tanpa perkecualian), semoga prestasi ini bisa kita tingkatkan dimasa yang akan datang. Namun ada hal yang kami sayangkan, yakni dengan predikat WTP ini tidak ada lagi pembahasan di DPRD mengenai LHP (laporan hasil pemeriksaan) BPK. Bahkan kami tidak lagi menerima naskah atau buku LHP tersebut, sehingga kami tidak mengetahui secara persis seberapa jauh predikat WTP tersebut maupun apa saja yang menjadi rekomendasi BPK kepada Pemerintah Kabupaten Rembang. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon diberi buku LHP BPK tsb. sebagai referensi kami menjalankan fungsi DPRD.
- Dari sisi PAD (pendapatan asli daerah) nyaris memenuhi target penerimaan yakni 99,31 %, harapan kami pada tahun mendatang kita bisa melampaui target pendapatan, terutama pendapatan asli daerah. Untuk itu, kami sangat mendukung upaya BPPKAD maupun OPD yang lain untuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan masyarakat.
- Mencermati kinerja pemerintah kabupaten Rembang dalam mencapai prioritas pembangunan yg ditetapkan dalam RKPD 2019 maka terdapat prioritas pembangunan yg tidak tercapai yakni peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dan penurunan angka kemiskinan. Maka mohon Pemkab bisa lebih fokus lagi terhadap bidang yang sangat dibutuhkan masyarakat ini.
- Terdapat capaian kinerja per urusan pembangunan dapat dikategorikan serapan anggaran tinggi (lebih 90%) tapi capaian target indikator rendah atau tidak tercapai. Ini disebabkan penggunaan anggaran tidak fokus dan asal-asalan. Mohon ini benar-benar bisa dikoreksi agar tidak terulang lagi di masa mendatang.

- Dan ada satu hal yang masih membuat kita sedikit kecewa yakni angka SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran) yakni sebesar Rp 40 milyar lebih.
- Setiap perencanaan proyek atau kegiatan, hendaknya disusun secara matang dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dan memelihara proyek atau kegiatan tsb. sehingga tidak terjadi proyek atau kegiatan yang mangkrak. Disamping itu perencanaan yang kurang matang mengakibatkan proyek atau kegiatan-kegiatan yang numpuk di akhir tahun anggaran sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Pemerintah Kabupaten Rembang telah mencanangkan bahwa pada tahun 2019 di Kabupaten Rembang tidak ada lagi jalan yang berlubang. Namun apa yang terjadi sampai akhir tahun 2019 ? Anggaran sudah ada, jumlahnya cukup besar, tetapi masih belum bisa menciptakan kondisi jalan tanpa lubang di kabupaten Rembang.

Teknis pemeliharaan/perawatan jalan dan jembatan di Kabupaten Rembang menurut kami belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena teknis pelaksanaannya masih secara manual yaitu dengan cara lapis penetrasi dan ada yang dilanjutkan dengan shand-sheet. Hal ini memakan waktu yang cukup lama, sementara jalan yang berlubang atau jalan yang rusak cukup banyak. Seharusnya kita sudah bisa melakukan peningkatan, pemeliharaan/perawatan jalan dengan menggunakan aspal hotmix yang kekuatannya tidak kita ragukan, serta waktu yang kita butuhkan juga sangat cepat. Tinggal pesan dari AMP, jalan yg rusak dibersihkan di beri hotmix dan selanjutnya digilas pakai wales kecil yang mudah dibawa dumptruck.

Kami meminta kedepan agar anggaran pemeliharaan/perawatan jalan dan jembatan di Kabupaten Rembang bisa ditambah, agar bisa menciptakan jalan mulus tanpa lubang. Demikian pula kerusakan jalan di pertigaan Pandangan bisa segera tertangani, juga kerusakan gorong-gorong di Kabupaten Rembang yang cukup banyak bisa segera tertangani, karena

jalan merupakan infrastruktur penting untuk menunjang akses perekonomian masyarakat.

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Karya Indonesia Sejahtera, selanjutnya raperda ini akan dibahas dalam Rapat-rapat Komisi bersama OPD nanti.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan para hadirin sekalian.

Sebelum turun dari mimbar ini kami akan sampaikan sebuah piweling dari pujangga besar Raden Ngabehi Ronggowarsito yang kiranya masih relevan dengan situasi saat ini, sbb.

“Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi.

Melu edan ora tahan, yen tan melu anglakoni.

Beja bejane kang lali, luwih beja kang eling lan waspada”.

(Hidup didalam jaman gila, memang serba repot.

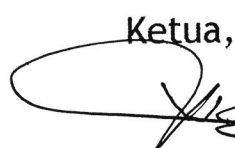
Akan mengikuti tidak sampai hati, tidak mengikuti tetap mengalami.

Walaupun orang yang lupa itu senang, namun lebih bahagia bagi orang yang senantiasa ingat dan waspada).

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu ‘alaikum wr. wb.

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,


AGUS SUTRISNO



Sekretaris,


PUDJI SANTOSA, SP, MH

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
I. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	Peningkatan kinerja yang lebih serius dan melakukan langkah-langkah strategis agar opini WTP dipertahankan.	1. Terima kasih, dukungan dan apresiasi yang disampaikan, guna mempertahankan opini WTP ditahun-tahun mendatang, kami siapkan langkah-langkah strategis bagi seluruh jajaran ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sehingga predikat opini WTP terus diterima Kabupaten Rembang.
2.	SiLPA APBD Tahun 2019 sudah dipastikan, mohon agar Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 segera diajukan untuk dilakukan pembahasan.	2. Terima kasih, secepatnya kami bahas dengan Tim TAPD guna percepatan penyusunan Rancangan Perubahan APBD T.A 2020.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
II. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1.	Masih ada kekurang cermatan dalam perencanaan target capaian PAD.	<p>1. Terima kasih koreksinya, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Rembang lebih cermat lagi dalam merencanakan penghitungan Target Pendapatan Pajak Daerah sehingga dapat terealisasi.</p> <p>Sekaligus menjawab dari fraksi Demokrat-Hanura. Adapun permasalahan Peningkatan PAD yang kurang signifikan salah satunya dikarenakan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/45 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang semula harga patokan penjualan batu gamping untuk semen dan industri adalah sebesar Rp. 70.000/m³ turun menjadi Rp. 50.800/m³ dan harga patokan penjualan batu gamping semula sebesar Rp. 45.000/m³ turun menjadi 32.000/m³.</p>
2.	Terkait belanja modal agar lebih serius optimalisasi penyerapan anggaran belanja dimaksud	<p>2. Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat serapan belanja modal dan barang/jasa adalah karena adanya gagal tender yang tidak mungkin diulang karena waktu (paket DAK) dan adanya efisiensi/sisa tender. Pemkab Rembang terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja realisasi belanja barang / jasa baik untuk belanja modal maupun barang/ jasa, melalui perencanaan T-1 untuk paket konstruksi bernilai besar dan membentuk satu bagian di sekretariat daerah yg khusus menangani pengadaan barang dan jasa yaitu bagian PBJ.</p>

3.	Pemberian sanksi tegas atas kelalaian pejabat teknis dalam pelaksanaan APBD	3. Terima kasih kami perhatikan.
4.	Kesiapan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan Surat Edaran Bupati Rembang Nomor 800/SE/2020	<p>4. Perencanaan penanganan covid-19 oleh Pemerintah Kabupaten Rembang sudah menyesuaikan dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020. Dalam hal penanganan bidang kesehatan berpedoman dengan penanganan berbasis desa, Pemerintah Desa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan dilakukan sampel-sampel dari berbagai tempat untuk melihat gambaran besar kondisi penyebaran covid-19.</p> <p>Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk tetap memberikan perhatian kepada Pihak Ponpes dimana apabila ada keluhan atau santri yang mengalami gejala-gejala yang mengarah pada covid-19, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan akan memberikan fasilitasi pemeriksaan. Kedepan Pemerintah Kabupaten dengan ponpes akan bekerjasama untuk menerapkan protokol kesehatan dalam rangka penanganan covid-19.</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	III. FRAKSI NASDEM	
1.	Kekurangan volume atas empat paket pekerjaan jangan sampai terjadi kembali	<p>1. DPUPR telah melakukan setoran ke kas daerah atas Pekerjaan Peningkatan Jalan Krikilan Dresipad tanggal 4 Mei 2020 dilengkapi dengan rekening koran.</p> <p>Dindikpora telah melakukan setoran ke Kas daerah atas kekurangan volume dan denda Keterlambatan padatanggal 15 Mei 2020 dan dilengkapi dengan rekening koran.</p> <p>Atas kelebihan bayar pada Dinkes akan dipotongkan/diperhitungkan ulang atas kekurangan pembayaran yang akan dianggarkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2020.</p>
2.	TAPD Mempedomani Peraturan Bupati berkaitan dengan Penyaluran Hibah melebihi ketentuan	<p>2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 12A, Ayat (1) huruf c, Peraturan Bupati Rembang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Besaran hibah berupa uang barang/jasa yang diberikan kepada badan dan lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan formal berupa SD/MI, SMP/Mts, dan SMA/MA paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga Hibah Kepada MTs sebesar Rp. 200.000.000,- sudah sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 12A, Ayat (2), Peraturan Bupati</p>

		<p>Rembang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Hibah berasal dari pemerintah/pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya yang pemberiannya melalui APBD Kabupaten Rembang tunduk pada pemberi hibah sehingga kelompok yang sumber hibahnya dari DAK Fisik dan DAK non Fisik tunduk kepada aturan pusat mengenai DAK Fisik dan DAK Non Fisik.</p>
3.	<p>Melaksanakan dengan baik action plan tindaklanjut LHP BPK R.I</p>	<p>3. Pada tahap action plan yang pertama Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan beberapa rekomendasi dari BPK RI seperti Penyetoran Ke Kasda terhadap kekurangan volume pekerjaan dan Pengurangan Pembayaran untuk tahap selanjutnya pada pekerjaan yang ada pada Dinas Kesehatan.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Rembang juga telah membuat Perjanjian Kerjasama dengan Bank BRI berkaitan dengan Rekening Penampungan Setoran Retribusi Daerah.</p>
4.	<p>Pembangunan di Kabupaten Rembang harus berjalan lebih baik terutama dalam membangun fasilitas publik</p>	<p>4. Sekaligus menjawab pertanyaan fraksi demokrat-hanura. Kami akan melakukan optimalisasi anggaran pembangunan baik melalui kegiatan pemeliharaan jalan maupun peningkatan/pembangunan jalan.</p>

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	IV. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Berkaitan dengan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar 40 M	1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar 40 M sudah direncanakan untuk menutup defisit APBD Tahun Anggaran 2020.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
V. FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA		
1.	Buku LHP BPK agar disampaikan ke DPRD.	1. Pengiriman LHP BPK R.I dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD.
2.	PAD nyaris memenuhi target penerimaan yaitu 99,31 %	2. Terima kasih apresiasinya.
3.	Prioritas pembangunan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan tidak tercapai.	3. Kedepan kami perhatikan penyelesaian dimaksud.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI. FRAKSI DEMOKRAT - HANURA	
1.	Terkait dengan program perencanaan pembangunan Rembang kedepan masih sangat minim terbukti dengan minimnya program kegiatan FS atau study misalnya : penanggulangan abrasi pantai, bendungan besar/ embung, kekurangan air bersih, kekeringan, dermaga PPI lengkap dengan kolam tambat, dan juga alun-alun lasem yang sudah tidak pantas lagi. Ini menunjukkan masalah Rembang yang urgent belum dipikirkan pemerintah kabupaten.	1. Kami sepakat dan kedepan akan menindaklanjuti permasalahan tersebut.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

**RAPAT PARIPURNA (III)
DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019**

Hari : Kamis
Tanggal : 25 Juni 2019
Waktu : 11.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
III. **ACARA RAPAT:**

1. Pembukaan;
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
7. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 6 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |
| 6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera | : 7 orang |
| Jumlah | <hr/> : 45 orang |

VII. ANGGOTA YANG HADIR

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang |
| 2. Fraksi Kebangkitan Bangsa | : 8 orang |
| 3. Fraksi Nasional Demokrat | : 8 orang |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 orang |
| 5. Fraksi Demokrat Hanura | : 6 orang |

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: 7 orang
Jumlah	<hr/> : 44 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: - orang
3. Fraksi Nasional Demokrat	: - orang
4. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
5. Fraksi Demokrat Hanura	: - orang
6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	: - orang
Jumlah	<hr/> : 1 orang

**IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL MZ**

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

- Saudara Bupati, Wakil Bupati, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang

Dan yang saya hormati

- TAPD Kabupaten Rembang, dan Sekretaris DPRD beserta staf.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja, puji serta syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2020 kita berkesempatan bertemu kembali untuk melaksanakan Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas

Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dengan keadaan sehat wal-afiat.

Peserta rapat yang berbahagia.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 44 orang.

Ketentuan keabsahan kuorum rapat paripurna ketiga dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ini adalah sama dengan yang berlaku pada rapat paripurna sebelumnya, baik rapat paripurna pertama tanggal 16 Juni 2020 maupun rapat paripurna kedua tanggal 17 Juni 2020 yaitu dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian keabsahan kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi, dan rapat paripurna dapat kita mulai.

Dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.58 WIB Rapat Paripurna Ketiga dalam membahas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 saya nyatakan dibuka.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Peserta rapat yang berbahagia.

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.

2. Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
3. Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
4. Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
5. Penandatanganan Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Rembang dilanjutkan Penyerahan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Penetapan Raperda;
6. Pendapat akhir Bupati atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Untuk hal tersebut, saya minta bantuan Saudara Drs. Drupodo, M.Si. untuk menyampaikannya.

===== LAPORAN BANGGAR =====

Terimakasih Saudara Drs. Drupodo, M.Si. atas bantuannya.

- *(Laporan Banggar atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)*

Peserta rapat yang berbahagia..

Acara ketiga yaitu Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Untuk kelancaran dalam penyampaianya, kepada juru bicara masing-masing fraksi saya minta menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Sdr. Sumardi
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Sdr. Supadi
3. Fraksi Nasional Demokrat : Sdr. Sustiyono
4. Fraksi PDI Perjuangan : Sdr. Widodo,S.H.
5. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera : Sdr. Wiwin Winarto,S.H.
6. Fraksi Demokrat Hanura : Sdr. Mugiyarto,S.T.

Secara berurutan, dimulai dari juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan disilahkan.

PENDAPAT FRAKSI

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	✓		
Fraksi Nasional Demokrat	✓		
Fraksi PDI Perjuangan	✓		
Fraksi Karya Indonesia Sejahtera	✓		
Fraksi Demokrat Hanura	✓		

Terima kasih kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaianya.

➤ (*Pendapat fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir*)

Hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara keempat yaitu Persetujuan penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Dari laporan Badan Anggaran maupun pendapat masing-masing Fraksi, sudah dapat disimpulkan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dapat disetujui. Namun untuk keabsahannya, perlu persetujuan secara lesan dari rekan-rekan anggota dalam rapat paripurna ini. Saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota :

“Apakah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dan Rekomendasi yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD dapat disetujui ?”

=====SETUJU=====

(Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 3 kali)

Terimakasih kepada rekan-rekan anggota atas persetujuannya.

Hadirin yang berbahagia.

Dengan memperhatikan Pasal 320 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta atas dasar persetujuan dari anggota, selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, saya minta kepada Sekretariat DPRD untuk memandu jalannya prosesi penandatanganan berikut penterahan surat keputusan. Disilahkan.

===== PENANDATANGAN PERSETUJUAN BERSAMA =====

Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memandu jalannya penandatanganan bersama.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita masuki acara terakhir yaitu Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Kepada Saudara Bupati, waktu dan tempat disilahkan.

===== PENDAPAT AKHIR BUPATI =====

Terima kasih saudara H. Abdul Hafidz, S.Pd.I. atas penyampaiannya.

➤ ***(Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terlampir)***

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda pada rapat paripurna ini telah kita lalui, maka selesai sudah acara Rapat Paripurna Ketiga ini. Terima kasih kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, sehingga pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun

Anggaran 2019 ini dapat berjalan baik dan lancar. Selanjutnya Raperda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang telah disetujui bersama ini, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

Akhirnya dengan mengucap “ *Alhamdulillah* ” tepat pukul 13.20 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

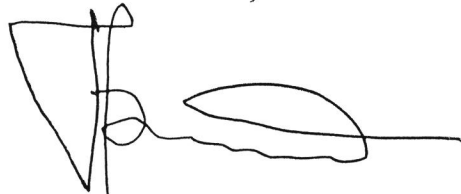
Terimakasih atas perhatian dan kehadirannya, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan rapat ini.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. MAJID KAMIL MZ

SEKRETARIS,



Drs. DRUPODO, M.Si.

Pembina Utama Muda

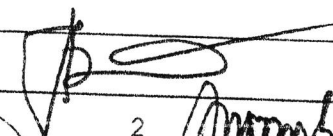
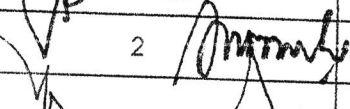
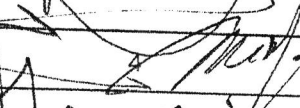
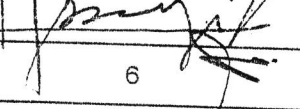

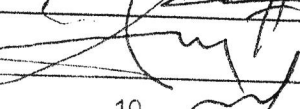
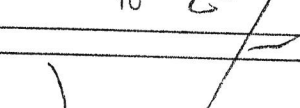
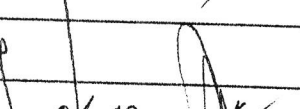
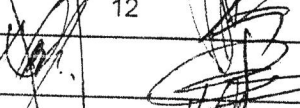
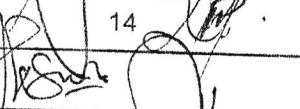
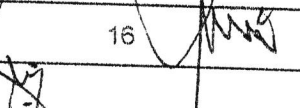
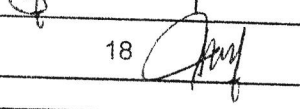

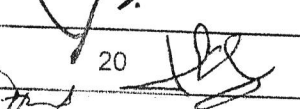
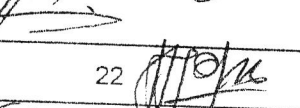
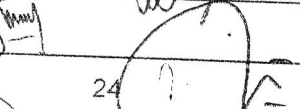




NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD
KABUPATEN REMBANG TENTANG RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah , SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Laporan Banggar atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
- LAMPIRAN IV : Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
- LAMPIRAN VI : Keputusan DPRD Nomor Tahun 2020 Tentang Persetujuan Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;

DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

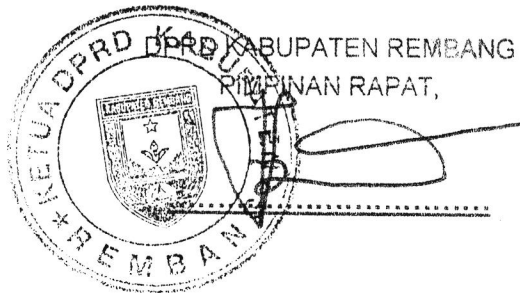
HARI/TANGGAL : KAMIS, 25 JUNI 2020
 PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		
2	SUGIHARTO	Anggota		
3	H.M. MURSYID, S.T.	Anggota		
4	SUMARDI	Anggota		
5	MUNTHOHID, S.H.	Anggota		
6	SULISTYO WETI ARIANI, S.H.	Anggota		
7	SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI	Anggota		
8	SUNARDI, S.Pd.I.	Anggota		
9	H. SUPADI	Anggota		
10	ABDUL ROUF	Anggota		
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA				
11	H. BISRI CHOLIL LAQOUF	Wakil Ketua DPRD		
12	MAHMUDI	Anggota		
13	ILYAS	Anggota		
14	NASIRUDIN, S.Si.	Anggota		
15	JOKO SUWITO, S.E.	Anggota		
16	Drs. H. MUH. SUBAWOTO	Anggota		
17	SUPADI	Anggota		
18	HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.	Anggota		
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)				
19	SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.	Wakil Ketua DPRD		
20	SUSTIYONO	Anggota		
21	FRIDA IRIANI	Anggota		
22	YATIN ABDUL ZAENAL	Anggota		
23	ANDI KURNIAWAN	Anggota		
24	KHAMID, S.E., Sy.	Anggota		
25	MASHADI, S.Pd, M.M.	Anggota		

FRAKSI PDI PERJUANGAN			
27	RIDWAN, S.H. M.H.	Wakil Ketua DPRD	27
28	JASMANI	Anggota	28
29	DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.	Anggota	29
30	WIDODO, S.H.	Anggota	30
31	ADI PURWOTO	Anggota	31
32	SUMARSIH	Anggota	32
FRAKSI DEMOKRAT HANURA			
33	H. GUNASIH, S.E	Anggota	33
34	ACHMAD ZAMHURI, S.H.	Anggota	34
35	H. HARNO, S.E.	Anggota	35
36	MUGIYARTO, S.T.	Anggota	36
37	MOH NUR HASAN, S.H.M.H.	Anggota	37
38	DUMADIYONO, S.H.	Anggota	38
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA			
39	PUJI SANTOSO, S.P, M.H.	Anggota	39
40	H. YUDIANTO, S.H.	Anggota	40
41	WIWIN WINARTO, S.H.	Anggota	41
42	AGUS SUTRISNO	Anggota	42
43	GHO FAR ISMAIL, S.Pd.I.	Anggota	43
44	RABIS SWABIHANTORO	Anggota	44
45	ANJAR KRISNIAWAN, S.T	Anggota	45

Keterangan :

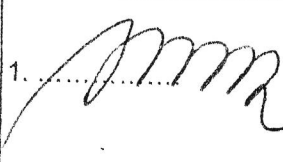
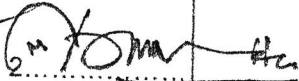
- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



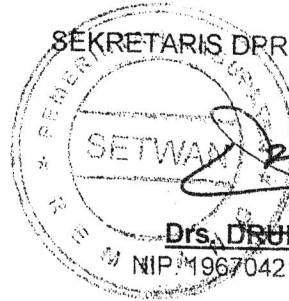
DAFTAR HADIR BUPATI, WAKIL BUPATI REMBANG DAN Pj. SEKDA REMBANG
 RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
 TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019

HARI/TANGGAL : KAMIS, 25 JUNI 2020

PUKUL : 11.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I.	Bupati Rembang	1. 
2	H.BAYU ANDRIYANTO,S.E.	Wakil Bupati Rembang	2. 
3	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	3.

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

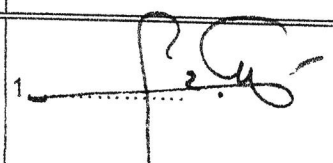
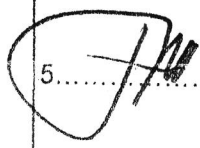
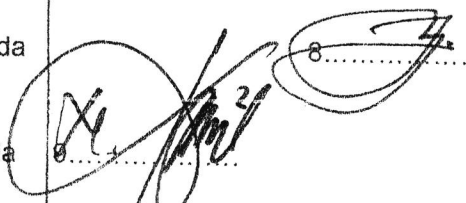
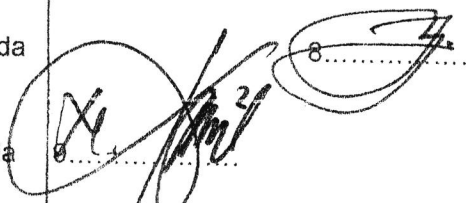


Drs. DRUPODO, M.Si

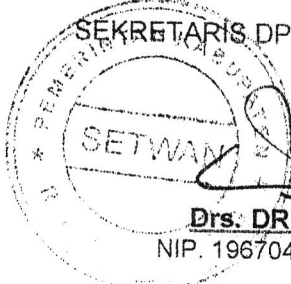

NIP. 19670421 199303 1 009

**DAFTAR HADIR TAPD KABUPATEN REMBANG
RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

**HARI/TANGGAL : KAMIS, 25 JUNI 2020
PUKUL : 11.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. ACHMAD MUALIF	Pj. Sekertaris Daerah	1. 
2	Asisten I Sekda	2.
3	Asisten II Sekda	3.
4	Asisten III Sekda	4.
5	MUSTEN	Ka. BPPKAD	5. 
6	Ka. BAPPEDA	6.
7	Kabag. Hukum Setda	7.
8	Wahyu Dian	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	8. 
9	NIRPURNOMO	Kabag. Tata Pemerintahan Setda	9. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG


SETWAN 

Drs. DRUPODO, M.Si
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

I. PENDAHULUAN

1. Bahwa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 perlu diadakan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
2. Bahwa hasil pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 dilaporkan oleh Badan Anggaran pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

II. DASAR

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang

- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 ;
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
 10. Surat Bupati Rembang Nomor 900/1192/2020, tanggal 10 Juni 2020 perihal Pengiriman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ;
 11. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 15 Juni 2020 yang mengagendakan Penjadwalan Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

III. PELAKSANAAN

1. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juni 2020 Jam 12.04 WIB dengan acara Penjelasan lanjutan atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
2. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan pada tanggal 17 Juni 2020 Jam 14.00 WIB membahas Strategi dan Distribusi Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.
3. Rapat-rapat Komisi I, II, III, dan IV DPRD Kabupaten Rembang dengan OPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :

Hari	: Kamis, Jum'at dan Senin
Tanggal	: 18, 19 dan 22 Juni 2020
Jam	: 10.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Rembang
Acara	: Pendalaman Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019
4. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-komisi DPRD Kabupaten Rembang pada :

Hari	: Selasa
------	----------

Tanggal : 23 Juni 2020
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD
Acara : Penyampaian Laporan Komisi atas Pendalaman Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

5. Rapat Badan Anggaran DPRD dengan TAPD pada :

Hari : R a b u
Tanggal : 24 Juni 2020
Jam : 13.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Sidang Paripurna DPRD
Acara : Sinkronisasi pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, sebagaimana jadwal yang telah ditentukan . Adapun ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2018

RINGKASAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD 2019

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
1	PENDAPATAN DAERAH	1,871,420,964,071.00	1,821,899,884,311.31	(49,521,079,759.69)	97.35	1,821,899,884,311.31	(49,521,079,759.69)	97.35
1.1	Pendapatan Asli Daerah	310,601,592,071.00	308,445,489,137.31	(2,156,102,933.69)	99.31	308,445,489,137.31	(2,156,102,933.69)	99.31
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	100,522,250,000.00	100,695,231,898.00	172,981,898.00	100.17	100,695,231,898.00	172,981,898.00	100.17
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	24,102,329,000.00	19,033,999,790.00	(5,068,329,210.00)	78.97	19,033,999,790.00	(5,068,329,210.00)	78.97
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,840,309,000.00	10,840,310,633.00	1,633.00	100.00	10,840,310,633.00	1,633.00	100.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	175,136,704,071.00	177,875,946,816.31	2,739,242,745.31	101.56	177,875,946,816.31	2,739,242,745.31	101.56
1.2	Dana Perimbangan	1,094,799,320,000.00	1,051,964,945,792.00	(42,834,374,208.00)	96.09	1,051,964,945,792.00	(42,834,374,208.00)	96.09
1.2.1	Dana Transfer Umum	850,594,561,000.00	838,539,540,291.00	(12,055,020,709.00)	98.58	838,539,540,291.00	(12,055,020,709.00)	98.58
1.2.2	Dana Transfer Khusus	244,204,759,000.00	213,425,405,501.00	(30,779,353,499.00)	87.40	213,425,405,501.00	(30,779,353,499.00)	87.40
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	466,020,052,000.00	461,489,449,382.00	(4,530,602,618.00)	99.03	461,489,449,382.00	(4,530,602,618.00)	99.03
1.3.1	Hibah	66,343,640,000.00	66,782,874,842.00	439,234,842.00	100.66	66,782,874,842.00	439,234,842.00	100.66
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	106,030,000,000.00	107,361,335,445.00	1,331,335,445.00	101.26	107,361,335,445.00	1,331,335,445.00	101.26
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258,436,412,000.00	258,436,412,000.00	-	100.00	258,436,412,000.00	-	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	35,210,000,000.00	28,908,827,095.00	(6,301,172,905.00)	82.10	28,908,827,095.00	(6,301,172,905.00)	82.10
2.	BELANJA DAERAH	1,940,245,226,611.19	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,146,931,663,256.19	1,122,949,019,444.00	(23,982,643,812.19)	97.91	1,122,949,019,444.00	(23,982,643,812.19)	97.91
2.1.1	Belanja Pegawai	679,834,930,033.19	662,778,873,449.00	(17,056,056,584.19)	97.49	662,778,873,449.00	(17,056,056,584.19)	97.49
2.1.2	Belanja Bunga	1,631,632,000.00	1,964,064,583.00	332,432,583.00	-	1,964,064,583.00	332,432,583.00	-
2.1.4	Belanja Hibah	55,583,592,000.00	50,515,064,812.00	(5,068,527,188.00)	90.88	50,515,064,812.00	(5,068,527,188.00)	90.88
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	8,244,660,000.00	8,093,600,000.00	(151,060,000.00)	98.17	8,093,600,000.00	(151,060,000.00)	98.17
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11,994,474,900.00	11,944,474,900.00	(40,000,000.00)	99.67	11,944,474,900.00	(40,000,000.00)	99.67

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)		PEMBAHASAN		
		SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	%	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	%	
		3	4	5	6	7	8	9	
1									
2									
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	388,375,509,700.00	387,652,941,700.00	(722,568,000.00)	99.81	387,652,941,700.00	(722,568,000.00)	99.81	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,276,864,623.00	-	(1,276,864,623.00)	-	-	(1,276,864,623.00)	-	
2.2	Belanja Langsung	793,313,563,355.00	740,553,808,666.13	(52,759,754,688.87)	93.35	740,553,808,666.13	(52,759,754,688.87)	93.35	
2.2.1	Belanja Pegawai	194,093,756,930.00	202,176,927,613.00	8,083,170,683.00	104.16	202,176,927,613.00	8,083,170,683.00	104.16	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	353,923,542,070.00	331,305,451,674.13	(22,618,090,395.87)	93.61	331,305,451,674.13	(22,618,090,395.87)	93.61	
2.2.3	Belanja Modal	245,296,264,355.00	207,071,429,379.00	(38,224,834,976.00)	84.42	207,071,429,379.00	(38,224,834,976.00)	84.42	
	Jumlah Belanja	1,940,245,226,611.19	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04	1,863,502,828,110.13	(76,742,398,501.06)	96.04	
	surplus (defisit)	(68,824,262,540.19)	(41,602,943,798.82)	27,221,318,741.37	60.45	(41,602,943,798.82)	27,221,318,741.37	60.45	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH								
3.1	Penerimaan Pembiayaan	155,692,630,540.19	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	75,692,630,540.19	75,415,765,915.62	(276,864,624.57)	99.63	75,415,765,915.62	(276,864,624.57)	99.63	
		80,000,000,000.00	77,865,903,390.00	(2,134,096,610.00)	-	77,865,903,390.00	(2,134,096,610.00)	-	
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	155,692,630,540.19	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45	153,281,669,305.62	(2,410,961,234.57)	98.45	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	86,868,368,000.00	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00	-	100.00	3,000,000,000.00	-	100.00	
3.2.3	Pembayaran pokok utang	83,868,368,000.00	68,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	-	68,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	-	
3.2.5	Restitusi atas kelebihan penetapan Pajak	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	86,868,368,000.00	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35	71,534,929,690.00	(15,333,438,310.00)	82.35	
	Pembiayaan Netto	68,824,262,540.19	81,746,739,615.62	12,922,477,075.43	118.78	81,746,739,615.62	12,922,477,075.43	118.78	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0.00	40,143,795,816.80	40,143,795,816.80	0.00	40,143,795,816.80	40,143,795,816.80	0.00	

B. REKOMENDASI :

1. DINLUTKAN :

Dalam rangka mengoptimalikan pencapaian realisasi PAD dari retribusi TPI, mohon Bupati untuk menempatkan personil Satpol PP di TPI setiap hari, untuk melaksanakan pengawasan kegiatan pelelangan.

2. DINTANPAN :

a. Terdapat pekerjaan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu:

- o Pembangunan Embung Pertanian Desa Banyuurip Kec. Gunem, dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
- o Pembangunan Embung Pertanian Desa Turusgede Kec. Rembang, dengan anggaran Rp. 200.000.000,-

Mengingat kedua embung tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kami mohon agar kedua embung tersebut dapat dianggarkan kembali pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020.

b. Kegiatan fisik pada tahun anggaran 2019 yang sudah terlaksana dan belum terbayar, mohon untuk diusulkan kembali dalam kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2020.

3. DINAS INDAKOP & UMKM :

a) Guna meningkatkan pendapatan dari retribusi, khususnya pasar, maka kegiatan pembangunan pasar hendaknya tidak hanya pada tampilan wajah depan akan tetapi harus diimbangi dengan perbaikan atau penambahan lapak pedagang.

b) Terkait renovasi pasar kecamatan Sarang yang ambrol, supaya dimasukkan pada kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2020.

4. BAPPEDA :

a) Agar OPD mensupport data-data ke Bappeda untuk mendukung aplikasi One Map Infrastruktur Terpadu.

b). Agar meningkatkan program-program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Rembang, karena angka kemiskinan masih besar di Kabupaten Rembang.

5. DPU TARU :

Perlu pembangunan penampung air baku untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Rembang, maka diharapkan Pemerintah kabupaten, dalam hal

ini DPU TARU, untuk berkonsultasi dan melakukan komunikasi, baik dengan BBWS Pemali Juana maupun BBWS Bengawan Solo.

6. BPBD :

- a) Perlu update data peta rawan bencana terbaru, karena peta rawan bencana yang digunakan saat ini tahun 2013.
- b). Untuk menampung peralatan dan logistik kebencanaan maka Pemkab perlu segera membangun gedung Pusdalog (pusat Data dan Logistik).

7. DPKP :

Agar lebih memaksimalkan dalam menggali potensi pendapatan daerah dari sektor perijinan (IMB), baik IMB dari perumahan maupun perusahaan yang ada di Kabupaten Rembang.

8. DINAS PERHUBUNGAN :

Perlu menginventarisir Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) se Kabupaten Rembang, baik yang rusak maupun yang sudah tidak layak, agar tidak membebani tagihan listrik dari PLN dan Pemda.

9. DINDIKPORA :

- a) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMP yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih minim penyerapannya yaitu sebesar 50 % dari pagu sebesar Rp 965.594.000,- . Hal ini disebabkan adanya adanya double anggaran baik APBD dan APBN yang disetujui ditengah perjalanan.
- b) Belanja modal dari dana BOS Sekolah Dasar (SD) yang tidak terlaksana, karena harus di lakukan proses tender/ lelang, sedangkan dari pihak sekolah tidak mampu memenuhi syarat dan ketentuan.
- c) Penyerapan belanja modal penyelenggaraan operasional Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang masih sangat minim, yaitu sebesar 11,05 % dari anggaran sebesar Rp. 533.734.500,-. Ini menunjukkan masih kurang optimalnya perencanaan dan penganggaran.

10. DINSOSPPKB :

- a) Pada tahun anggaran 2019 terdapat anggaran DAK untuk pengadaan sarana kerja petugas lapangan Keluarga Berencana dengan anggaran Rp. 413.100.000,- Hal ini disebabkan karena pemutusan kontrak sepihak oleh PPKom yang diakibatkan oleh kesalahan penyedia barang/jasa yang tidak memenuhi kriteria. Dasar

pemutusan kontrak sepihak oleh PPKom ini mengacu pada peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 pasal 3 huruf g.

- b) Penyerapan anggaran program pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cukup tinggi yaitu 98, 53 %, namun masih banyak ditemukan data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, karena data yang muncul tidak update.
- c) Kurang optimalnya peran TKSK dalam membantu program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), baik dalam menjamin kualitas maupun kuantitas sembako yang di terima penerima BPNT dari e-warung yang tidak bertanggung jawab.

11. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

- a) Inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan sektor pariwisata masih kurang, sehingga menyebabkan PAD masih sangat minim, yaitu hanya terealisasi sebesar 63 %.
- b) Adanya penyerapan anggaran yang kurang maksimal dalam penataan lingkungan obyek wisata Binangun yaitu pembangunan gapura, Hal ini disebabkan oleh penolakan masyarakat sekitar. Sehingga kedepan perlu koordinasi yang lebih intens dengan masyarakat setempat dan stakeholder dibidang pariwisata, sebelum melakukan penataan.
- c) Pengelolaan Taman Kartini kurang maksimal, sehingga mengakibatkan penurunan PAD dari sektor pariwisata.
- d) Pengelolaan kawasan makam RA Kartini melibatkan beberapa OPD, sehingga sering mengakibatkan lempar tanggungjawab terhadap pemeliharaan asset di sekitar museum yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Rembang. Seharusnya kawasandi kelola oleh satu OPD, sehingga OPD tersebut lebih fokus dalam pengembangan dan peningkatan wisata makam Kartini.

12. BAGIAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT :

- a) Penyerapan anggaran bagi masyarakat berprestasi masih minim yaitu hanya 42, 25 %, sehingga pembinaan dan peningkatan prestasi keagamaan perlu ditingkatkan, diantaranya penghargaan MTQ dan penurunan Tanfidz Qur'an.
- b) Verifikasi ke penerima bansos dan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat agar lebih dipertajam, baik verifikasi sebelum maupun

setelah diterimanya bantuan sosial tersebut. Sehingga manfaat bansos dan penunjang kesejahteraan masyarakat lebih optimal dan tepat sasaran.

- c) Fasilitasi peringatan hari besar Islam terserap sebesar 73,98 %, perlu ditingkatkan, diantaranya untuk fasilitasi Peringatan Hari Santri, Isro' miroj dan hari besar Islam lainnya.

13. DINAS KESEHATAN :

- a) Perencanaan belanja pegawai penyediaan jasa administrasi/kebersihan masih kurang optimal.
- b) Kurangnya sosialisasi secara masif pada program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program tersebut. Hal ini berakibat sangat minimnya penyerapan anggaran yaitu hanya terserap sebesar 36,33 %.
- c) Banyaknya anggaran belanja pegawai dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang tidak sesuai kebutuhan, diantaranya terlalu banyak jumlah perawat dan bidan di Puskesmas. Sedangkan berdasarkan hasil kunjungan dan pengawasan, masih banyak Puskesmas yang membutuhkan dokter gigi dan dokter umum, yang sampai saat masih kosong.
- d) Besarnya penyerapan anggaran program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada PPK-BLUD Puskesmas yaitu sebesar 93,90 % dari anggaran sebesar Rp 50.674.777.070,-, berbanding terbalik dengan tingkat kepuasan pasien dalam hal penanganan dan perawatan saat berobat.

14. BLUD-RSUD dr. R SOETRASNO :

- a) Penyerapan belanja pegawai sangat tinggi yaitu sebesar 130,94 %, meliputi jasa pelayanan yang banyak. Hal ini karena masih mengacu pada peraturan bahwa sesuai ketentuan, BLUD diperbolehkan menambahkan anggaran, namun tidak boleh melebihi 20% dari total belanja, dengan ketentuan biaya di tanggung oleh RSUD dr. R Soetrasno.
- b) Adanya penyerapan belanja modal yang masih minim yaitu sebesar 65,35 % dari pengadaan mesin dan pembangunan gedung RSUD. Hal tersebut disebabkan karena ketidaksesuaian anggaran yang

diklaim oleh kontraktor, yang proses pelaksanaannya tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak.

15. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN :

- a) Adanya perencanaan belanja pegawai pada program perbaikan sistem dan administrasi kearsipan yang tidak optimal dan sistematis yaitu hanya terealisasi sebesar 6,42 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 612. 930.000,-
- b) Belanja barang dan jasa program pengembangan minat dan budaya baca sebesar Rp. 4.573.738.400,- tidak sebanding dengan peningkatan minat baca masyarakat, sehingga perlu inovasi dan terobosan baru agar gairah baca masyarakat meningkat

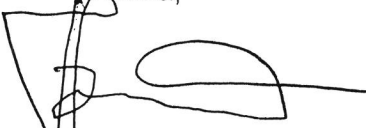
VI. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna III (tiga) DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 25 Junji 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
BADAN ANGGARAN

Ketua,



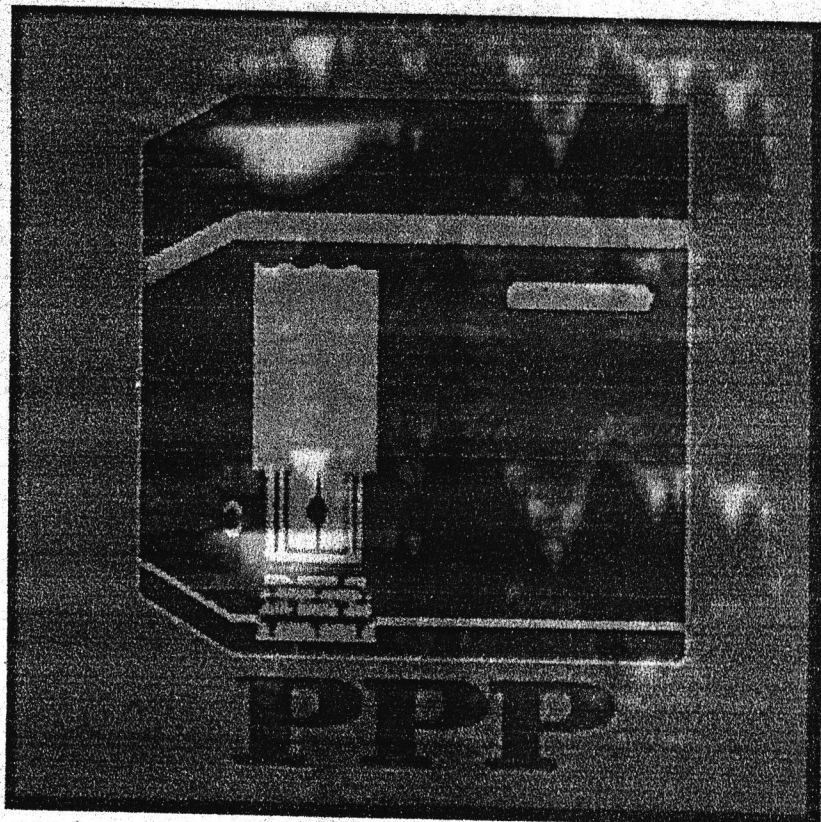
H. MAJID KAMIL, MZ

Sekretaris,



Drs. DRUPODO, MSi

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2019



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis , 25 Juni 2020

Dibacakan oleh : SUMARDI , SE

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG , TAHUN ANGGARAN 2019
DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG
Hari : Kamis , 25 Juni 2020
Dibacakan oleh : SUMARDI , SE

Assalamu a,laikum Warohmatullahi wabarokatuh.....

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM.....

Alhamdulillah , Assholatu wassalamu a'laa Rosulillah , Wa a'la alihi Washohbihi wamanwalah..., Laa haula Walaa quwwata Illabillah..., Amma ba'da ...

Yang kami hormati :

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Sdr. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- sdr. Pj Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda, dan para Camat dilingkungan Kabupaten Rembang.
- Sdr. Sekretaris Dewan beserta staf.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan-rekan Wartawan, dan semua hadirin yang dimulyakan oleh ALLAH SWT.

Sebelum kami lanjutkan penyampaian pendapat akhir ini, terlebih dahulu marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai kini, kita masih diberikan kesempatan hadir, pada Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai dihari kiyamat.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati, serta segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,

Mengawali penyampaian pendapat akhir ini, kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019, dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya menyanggah predikat WTP yang ke dua kali, meskipun dari hasil pembahasan, masih banyak adanya catatan kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan, terutama untuk pelaksanaan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

Kami sampaikan rasa terima kasih dan apresiasi juga kepada TAPD, yang telah bekerja keras, sehingga penyusunan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2019 ini, dapat selesai sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Mulai dari Penyampaian nota keuangan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2019 oleh sdr. Bupati pada rapat Paripirna I, dan juga jawaban pemandangan umum dari Fraksi-fraksi, yang telah disampaikan oleh sdr. Bupati pada rapat Paripurna ke II, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2019 yang lalu, sampai pada Pembahasan ditingkat Komisi bersama OPD, dan juga Banggar bersama TAPD.

Sdr. Bupati dan Wakil Bupati serta sidang Dewan yang kami hormati,

Sebelum pendapat akhir ini kami sampaikan, perkenankanlah kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, menyampaikan beberapa catatan dari hasil pembahasan, sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi pemenuhan PAD dari retribusi TPI, mohon agar Pemkab Rembang memberikan bantuan personil dari Satpol PP, untuk pengawasan agar lebih tertib dan aman.

2. Untuk kegiatan Fisik dan sarana prasarana tahun anggaran 2019, namun belum terlaksanakan , dan sudah yang sudah terlaksana namun belum terbayarkan , mohon supaya dianggarkan pada Perubahan APBD tahun 2020.
3. Dalam rangka mendukung Program Bappeda yaitu terlaksananya Aplikasi One Map Infratraktur terpadu , dimohon agar semua OPD mensupport data-data ke Bappeda.
4. Untuk mencukupi kebutuhan Air dan mengatasi kekeringan di Rembang , perlu Pembangunan Penampungan air baku, untuk kebutuhan hal tersebut , diminta agar DPU TARU melakukan Konsultasi dan komunikasi dengan BBWS Pemali Juwana atau BBWS Bengawan Solo.
5. Kurang optimalnya peran TKSK dalam membantu Program BPNT , sehingga masih sering ditemukan warga penerima bantuan yang tidak semestinya , dan ditemukan kualitas juga kuantitas sembako bantuan, yang tidak sesuai dengan ketentuan, mohon agar OPD yang terkait melakukan evaluasi, agar kedepan tidak terulang dan lebih baik.
6. Belanja barang dan jasa Program pengembangan minat dan budaya baca, sebesar Rp. 4.573.738.400,00 , realitanya tidak sebanding dengan minat baca masyarakat , untuk kedepan diminta agar OPD terkait melakukan strategi , inovasi dan terobosan serta sosialisasi , agar gairah minat baca masyarakat meningkat.
7. Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan , mohon dan mengusulkan kepada sdr. Bupati, agar segera memerintahkan TAPD, untuk mempersiapkan penyusunan dan mengajukan Rancangan KUA / PPAS APBD Perubahan 2020, dan KUA / PPAS APBD Induk 2021 , untuk segera ditindak lanjuti , dan dilakukan pembahasan.

Sidang Dewan yang kami hormati.....,

Selanjutnya, kami dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, setelah mencermati dan mengevaluasi terhadap RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019 secara keseluruhan, melalui pendapat akhir ini menyampaikan , dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim “ **MENERIMA DAN MENYETUJUI** ” RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2019 ini , untuk **DITETAPKAN MENJADI** “ PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Tahun Anggaran 2019.

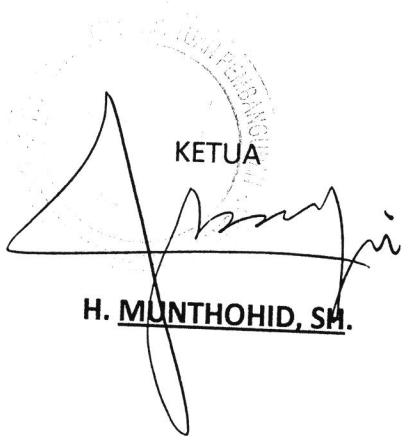
Demikian Pendapat akhir Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang hasil Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2019 .

Trima kasih atas segala perhatian , dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul muwafiq ila aqwamithoriq...., Wassalamu a'laikum Wr..... Wb.....

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Rembang , 25 Juni 2020


KETUA
H. MUNTHOHID, SH.

SEKRETARIS

H. SUNARDI. SPd. I.



Pendapat
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2019

disampaikan oleh

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang , Kamis 25 Juni 2020

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang;

Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah; Komandan Kodim Rembang, Kapolres Rembang, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri;

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se- Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali pendapat fraksi ini perkenankanlah kami menghaturkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT Atas segala limpahan Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati

karunia dan rahmat-Nya. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Selanjutnya kami dari FPKB mengucapkan terima kasih kepada :

1. Pimpinan Rapat Paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada FPKB untuk menyampaikan Pendapat FPKB terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019.
2. Sekretaris Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang telah menyampaikan laporan atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia

Setelah membaca laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2019, yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Anggaran pada tanggal 25 Juni 2020, FPKB bisa memahami laporan tersebut. Namun demikian, FPKB memandang perlu untuk memberikan pandangan, catatan, saran, rekomendasi, ataupun pernyataan terkait Ranperda ini, sebagaimana berikut :

1. Terkait realisasi PAD pada APBD Kab. Rembang TA. 2019 sebesar Rp. 308.445.489.137,- yang mengalami kenaikan sebesar Rp. 11.769.052.874,- atau sebesar 3.69 persen dibanding realisasi PAD pada APBD Kab. Rembang TA. 2018 sebesar Rp. 296.676.436.263,-, FPKB menilai kenaikan PAD ini belum cukup signifikan sebagai akibat jauhnya capaian target PAD yang bersumber dari pendapatan Retribusi Daerah yang hanya tercapai 78.97 persen ditambah belum optimalnya

pengelolaan potensi-potensi PAD yang bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah. FPKB merekomendasikan agar Pemkab Rembang kedepan mengoptimalkan seluruh potensi PAD yang ada dengan sistem pengelolaan yang baik, menekan kebocoran pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pemungut dan hal-hal lain yang diperlukan.

2. Terkait realisasi belanja modal pada APBD 2019 yang hanya tercapai 84,42 persen dan mengalami penurunan sebesar Rp. 102.377.076.516,- dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2018, FPKB merekomendasikan agar Pemkab Rembang di kemudian hari menyiapkan langkah-langkah strategis guna optimalisasi penyerapan belanja modal mengingat efek belanja modal langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat dan berdampak sistemik pada pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan angka kemiskinan.
3. Terkait tingginya anggaran belanja barang dan jasa pada APBD 2019 dibandingkan dengan APBD 2018, FPKB merekomendasikan agar Pemkab Rembang melakukan evaluasi atas efisiensi dan efektifitasnya untuk bisa dilakukan revisi kebijakan pada penyusunan APBD di tahun-tahun berikutnya. Pada prinsipnya, APBD adalah milik masyarakat yang pengelolaannya harus berorientasi untuk masyarakat (Civil oriented).
4. Pemkab Rembang perlu melakukan evaluasi Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada pembangunan laboratorium dan ruang praktikum SMP yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) masih minim penyerapannya yaitu sebesar 50 % dari pagu Rp 965.594.00,- . Hal ini disebabkan adanya double anggaran baik APBD dan APBN yang disetujui ditengah perjalanan.
5. Penyerapan anggaran program pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cukup tinggi yaitu 98, 53 %, namun masih banyak ditemukan data penerima bantuan yang tidak tepat sasaran karena data yang muncul tidak update sehingga perlu evaluasi dari pihak-pihak terkait.

6. Inovasi dan kreatifitas dalam menjalankan sektor pariwisata masih kurang, sehingga menyebabkan Retribusi Pajak Asli Daerah (PAD) masih sangat minim, yaitu 63 %.
7. Menyimpang dari pelaksanaan APBD 2019, dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Bupati Rembang Nomor: 800/SE/2020 tentang Kesiapan Pelaksanaan Kegiatan Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Rembang Pada Masa pandemic Covid 2019, FPKB berharap Pemkab hadir secara fisik tidak hanya himbauan.

Rapat Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian beberapa rekomendasi dari kami, dan dengan mengucapkan Bismilahirrahmanirrahim, FPKB menyatakan **Dapat Menerima dan menyetujui** "Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 " untuk disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Rembang .

Sidang Dewan yang kami Muliakan

Demikian pendapat Akhir FPKB ini disampaikan dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih

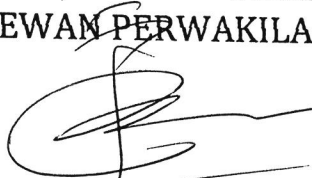
Wallahul Muwaffiq Ilaa aqwamit thorieq

Wasalammu'allaikum Wr. Wb.


Rembang, 25 Juni 2020

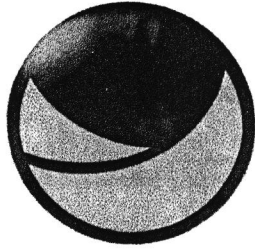
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


Ilyas
Ketua




Nasirudin, S.Si
Sekretaris



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**



PARTAI NasDem
GERAKAN PERUBAHAN

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Rembang
Telp. (0295) 691194

PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

Salam Restorasi

Gerakan Perubahan

Yth. Saudara Bupati Rembang;

Yth. Wakil Bupati Rembang;

Yth. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;

Yth. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

Yth. Para Pemuka Masyarakat, Rekan-rekan Insan Pers, dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita semua dapat menghadiri acara penyampaian "**Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019**" dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sholawat serta salam marilah kita lantunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam, dan semoga kita sebagai umat mendapatkan syafaatNya di yaumul akhir. Amin Ya Robbal Alamin.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Setelah membaca dan mencermati laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, dan laporan komisi-komisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019, ijin kami dari Fraksi NasDem menyampaikan pendapat akhir terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Pendapat akhir ini bertujuan mengambil pelajaran dari pelaksanaan APBD 2019 untuk perbaikan di masa mendatang, walaupun terdapat masukan, saran dan kritik semuanya untuk pembangunan Rembang yang lebih baik.

Saudara pimpinan rapat, peserta rapat, dan para hadirin yang kami hormati.

Selanjutnya, ijin kami menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Sisa anggaran 2019 di BKD terkait kegiatan seleksi CPNS khususnya anggaran seleksi tahap 2 yaitu SKB yang belum jalan, agar anggarannya tetap ada di pos tersebut untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu seleksi tahap 2 ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
2. Perlunya peningkatan PAD dalam bidang pariwisata terutama pengelolaan kawasan makam RA. Kartini dan Pantai Kartini perlu dikelola dengan baik agar bisa memberikan kontribusi.
3. Mengingat Rembang sebagai Kota Santri maka perlu mengoptimalkan fasilitasi hari besar Islam yang baru mencapai 73,98%.
4. Anggaran belanja barang dan jasa program pengembangan minat dan budaya baca sebesar Rp. 4.573.738.400,- ini adalah anggaran yang cukup besar, akan tetapi belum bisa menaikkan secara signifikan minat baca di Rembang. Berdasarkan pantauan kami pada 24 Juni 2020, aplikasi iRembang milik Pemda Rembang hanya di download 1000 kali, tentunya hal ini ironis dengan jumlah anggaran yang cukup besar di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Dalam aplikasi iRembang jumlah koleksi bukunya juga masih sedikit dan hanya terbatas untuk buku sekolah SD/SMP/SMA sederajat. Artinya perlu perluasan koleksi bacaan untuk umum dan civitas akademika (masyarakat kampus) dalam aplikasi iRembang. Seiring jaman modern yang serba digital, kami mendukung program pengembangan minat dan budaya baca melalui aplikasi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar lebih baik.

5. Kami menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 untuk disahkan menjadi Perda.

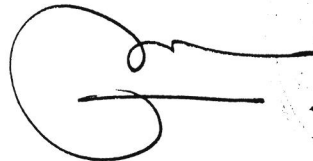
Demikian Pendapat Akhir ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk dan jalan yang terbaik kepada kita semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 Juni 2020

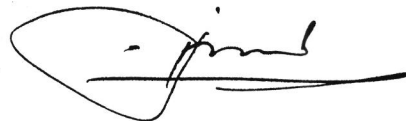
**FRAKSI NASDEM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Ketua



H. MASHADI, S.Pd., M.M.

Sekretaris



FRIDA IRIANI



**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

PENDAPAT FRAKSI

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2019

Hari / Tanggal : Kamis 25 Juni 2020

Dibacakan oleh : Adi Purwoto

Bismillahirrohmannirohim

Assalamu' alaikum Wr, Wb

Salam Sejahtera bagi Kita Semua,

Merdeka.....Merdeka.....Merdeka....!!!

Yang terhormat, Sdr Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA)

Kab. Rembang

Yang Terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Semua Kabag di lingkungan Setda Rembang

Yang terhormat, Ka Dinas, Ka Badan , Ka Kantor dan Camat se- Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Sekretaris DPRD Kab. Rembang, Kabag beserta jajarannya.

Lsm, Rekan Wartawan, Ormas dan semua pihak yang telah hadir pada hari ini yang kami hormati

Hadirin Sidang Paripurna Yang Kami Muliakan,

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan nikmatNya lah kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang ditengah situasi pandemi wabah *Covid-19* ini, berikutnya tak lupa Sholawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.

Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Muliakan,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum fraksi ini, izinkan kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Terkait hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, Kami dari Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami, menerima serta menyetujui Raperda tersebut untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, dengan catatan-catatan sebagai berikut :

- Untuk dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang menurun, kami berharap Pemerintah Kabupaten Rembang untuk lebih serius melakukan pengawasan rutin setiap hari dalam kegiatan pelelangan.
- Dikarenakan masih banyaknya daerah-daerah yang rawan bencana kekeringan ditahun-tahun kemarin serta tidak terlaksananya anggaran PAB (Pengadaan Air Bersih) di DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), maka kami berharap agar Dinas-dinas terkait segera melakukan koordinasi dengan Balai Besar Provinsi Jawa Tengah dalam hal perijinan agar anggaran PAB (Pengadaan Air Bersih) di tahun anggaran berikutnya 2021 bisa terlaksanakan.

- Dalam hal pemeliharaan penerangan jalan, ada baiknya jika Dinas Perhubungan bisa menginventarisasi Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dengan spesifikasi yang sama, dan juga perlu dilakukan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tersebut, sehingga beban listrik dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tersebut tidak membebani tagihan Listrik dari PLN pada Pemerintah Daerah.

Demikian telah kami sampaikan Pendapat Fraksi PDI Perjuangan terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk, kemudahan, kelancaran dan perlindungan dari Allah SWT dalam beraktivitas ditengah situasi pandemi wabah *Covid-19* ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Aamiin...

Wabillahi taufiq wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Wr, Wb,

Merdeka....Merdeka....Merdeka....

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua


JASMANI



Sekretaris

WIDODO, SH

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019**



**FRAKSI DEMOKRAT- HANURA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Rembang, 25 JUNI 2020

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang Telp. (0295) 691194

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT-HANURA
TERHADAP
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD TAHUN ANGGARAN 2019**

RABU, 25 JUNI 2020

Dibacakan oleh : MUGIYARTO, S.T.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati, wakil bupati Rembang
2. Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Rembang
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
4. Saudara Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
5. Saudara Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian SETDA dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
6. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, Rekan Wartawan dan Segenap hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ini perkenankan kami mengajak hadirin untuk memanjatkan do'a supaya kita semua dan masyarakat Rembang terhindar dari Virus Covid-19 karena hari-hari terakhir ini bertambah banyak yang terpapar Virus Covid-19.

Dan kita tidak lupa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir. mengikuti rapat Paripurna DPRD semoga mendapat hasil dan keputusan yang benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang ini.

Bupati , Wakil Bupati dan Sidang Dewan yang Terhormat,

Dengan mengucapkan Bismillahirrahmannirrahim kami Fraksi Demokrat-Hanura menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 dengan catatan sebagai berikut :

1. Mengenai infrastruktur jalan Kabupaten sudah relatif bagus akan tetapi yang jadi masalah adalah jalan antar desa yang belum sesuai dengan slogan Rembang tanpa lubang, untuk itu kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menindaklanjuti.
2. Penyedia air baku (PDAM) Rembang tidak pernah koordinasi dengan dewan sehingga seolah-olah jalan sendiri Kami menemui di lapangan masih banyak air yang tidak mengalir di masyarakat.
3. Inventarisasi Desa yang rawan bencana ada 49 Desa dari sekian banyak desa yang rawan bencana hanya satu Desa yang ditindaklanjuti.
4. Prestasi olahraga dari tahun ke tahun terus merosot dan memprihatinkan apakah bidang olahraga sudah tidak punya semangat untuk membenahi sehingga dibiarkan tanpa prestasi untuk itu kami mengharap di tahun-tahun mendatang di perbaiki.
5. Kami mengharap supaya kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun 2019 mohon dianggarkan di Anggaran Perubahan di Tahun 2020.
6. Pelaksanaan Pembagian Dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya membantu menyejahterakan petani tembakau terutama untuk memperbaiki jalan-jalan antar Desa penghasil tembakau.

Demikianlah Pendapat Fraksi Demokrat-Hanura ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Bupati, Saudara Wakil Bupati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD serta segenap tamu undangan, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf

Billahi Taufik Wal Hidayah


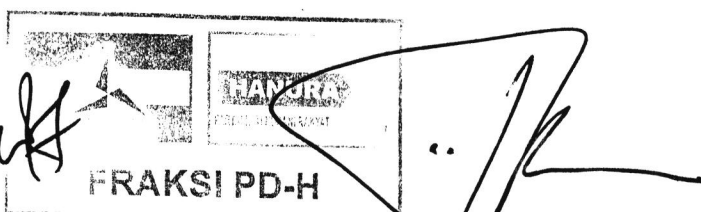
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 25 Juni 2020

**FRAKSI DEMOKRAT - HANURA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

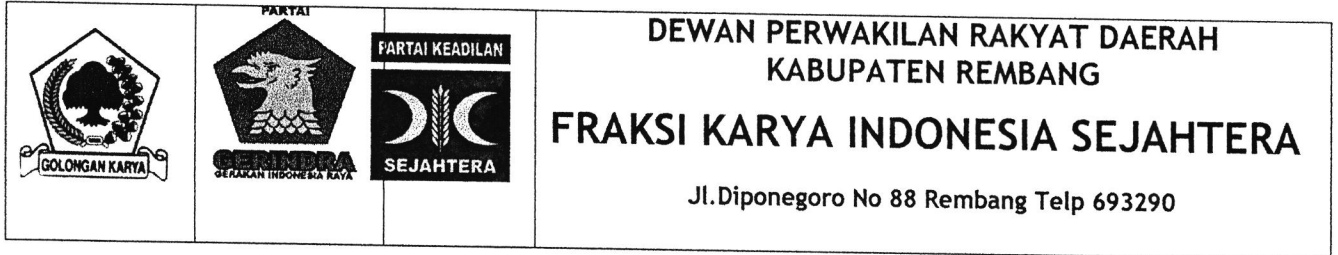
KETUA

SEKRETARIS

MUGIARTO, S.T

DUMADIYONO, S.H.



**PENDAPAT
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA
DPRD KABUPATEN REMBANG**

atas

**RAPERDA
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Rembang
Hari Kamis, 25 Juni 2020

Juru Bicara: **WIWIN WINARTO, SH**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang.
- Yang terhormat Sdr Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang.
- Yang terhormat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dan para hadirin sekalian.

Pada kesempatan ini, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang memanjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT. Demikian pula Fraksi KIS mengucapkan "Selamat Hari Parlemen Sedunia" yang jatuh pada tanggal 30 Juni nanti.

Saudara, parlemen berasal dari kata "le parlo" bahasa Yunani yang berarti "mulut", maka seorang anggota parlemen baik itu yang duduk di MPR, DPD, DPR, DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota maupun BPD di desa wajib menggunakan mulutnya untuk bekerja atau bicara. Berbicara dalam arti menyuarakan kehendak rakyat serta membela kepentingan rakyat yang diwakilinya. Anggota parlemem harus bisa memberikan kritik konstruktif dan saran kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah jangan tabu terhadap suara parlemen.

Saudara Bupati dan hadirin sekalian.

Setelah melakukan pembahasan yang cukup hangat dalam Rapat Kerja Komisi dengan OPD maupun Badan Anggaran dengan TAPD, tibalah saatnya Fraksi Karya Indonesia Sejahtera DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan Pendapat Akhir atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati seminggu yang lalu.

Didepan, Badan Anggaran DPRD telah menyampaikan beberapa rekomendasi, namun menurut kami ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah, sbb:

- Keberadaan THL (tenaga harian lepas) yang ditempatkan di OPD maupun kecamatan jumlahnya mencapai 1600-an, ini berpotensi menjadi beban anggaran daerah. Memang ada THL yang dibutuhkan tenaganya, namun dengan banyaknya THL tersebut justru menunjukkan bahwa kinerja pegawai negeri (ASN) yang kurang bagus belum optimal. Saran kami agar dalam penempatan THL ini harus berdasar skala kebutuhan dan pendanaan, serta terkoordinasi dengan OPD atau kecamatan yang akan ditempati
- Terkait retribusi TPI, Pemkab hendaknya segera memberi solusi tentang pembayaran lelang di TPI agar lebih mudah dan murah, dengan pemberian hibah modal dan investasi kepada pihak ketiga dari bank atau koperasi.

- Pemkab hendaknya lebih peduli kepada para penyuluh pertanian di lapangan dengan memberikan dana operasional dan perangkat kerja yg memadai di tiap kantor BPP Kecamatan, karena mereka adalah garda terdepan ketersediaan pangan kita.
- Pendapatan dari TPI turun sekitar Rp. 5 milyar dari target yang di tetapkan yaitu Rp 14 milyar dan hanya tercapai Rp. 9 milyar. Hal ini hendaknya mendapat perhatian serius dari Pemkab Rembang.
- Tagihan listrik pada LPJU (lampu penerangan jalan umum) yang selama ini PLN menggunakan cara aboemen atau langganan disama ratakan. Jumlah titik LPJU yang ada dikalikam rekening pertitik yang ditetapkan oleh PLN, sehingga tagihan dari PLN mencapai Rp. 9 milyar lebih, hal ini dirasa merugikan keuangan daerah. Sebab kenyataannya tiap LPJU tidak sama bebannya bahkan banyak LPJU yang sudah rusak atau mati. Maka saran kami tiap titik atau tiang LPJU dipasang meteran sehingga kita tahu persis berapa sebetulnya tagihan listrik yang harus kita bayar ke PLN.
- Mengenai pekerjaan rutin pemeliharaan jalan dan jembatan, kami mengusulkan agar Dinas PU Taru mempunyai stock atau persediaan material yang siap pakai. Sehingga manakala ada kerusakan jalan dan jembatan segera bisa diatasi, terutama pada akhir tahun anggaran memasuki tahun anggaran baru.
- Menurut pengamatan kami banyak pekerjaan Dinas PU Taru yang tidak efisien, misalnya perbaikan jalan Clangapan. Sudah ada box culvert, kenapa harus dicor lagi dibagian atasnya, padahal seharusnya cukup dipadatkan urugan biscos dan dilapis perkerasan aspal.
- Mengenai sistem lelang proyek, kami minta agar Pemkab Rembang membuat sistem lelang yang bisa menarik para investor agar mau menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang.
- Efisiensi kinerja pada Dinas Kesehatan perlu ditingkatkan, besarnya anggaran tidak diikuti dengan kualitas pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kepuasan pasien dalam penanganan dan perawatan saat berobat.
- Kasus di RSUD dr. R Soetrasno Rembang;
Ada seorang peserta BPJS mandiri kelas I, rawat inap minta naik ke kelas VIP. Pada saat selesai perawatan ditagih selisih biaya naik kelas yang harus dibayar, dia menolak membayar bahkan minta "katabelece" kepada Bupati dan disetujui. Pihak RSUD juga meluluskan hal tersebut.

Pertanyaannya, apakah hal tersebut dibenarkan. Kalau dibenarkan, bagaimana prosedur seharusnya, apakah hanya cukup dengan “katabelece” saja. Apakah hal tersebut tidak merugikan rumah sakit. Menurut kami hal tersebut akan menjadi preseden buruk selanjutnya.

Saudara Bupati dan hadirin sekalian

Demikianlah pendapat akhir kami, dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi Karya Indonesia Sejahtera menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Kabupaten Rembang ditetapkan menjadi Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019 Kabupaten Rembang.

Sebelum turun dari mimbar ini kami ingin mengutip sebuah piweling dari orang-orang tua kita dahulu sbb:

“Kahanan ndonya iki ora langgeng, tansah mobah mosik. Yen sira lagi ketunggon bandha lan kasinungan pangkat, aja banjur rumangsa “*sapa sira sapa ingsun*”, ngendel-endelake panguwasa tumindak deksura marang sapadha-padha. Elinga yen bandha iku gampang sirna, pangkat lan drajat bisa oncat ing saben wayah”.

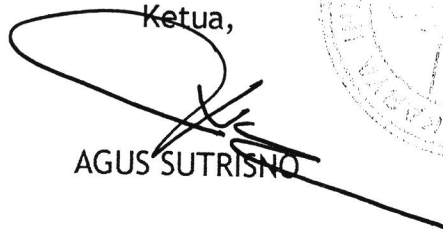
Artinya: Kedaaan dunia ini tidak pernah tetap, selalu berubah. Kalau sedang ditunggu kekayaan pangkat dan derajat, jangan pernah merasa “siapa kamu siapa saya” selalu menunjukkan kekuasaannya, bertindak semaunya pada sesama. Ingatlah bahwa harta itu bisa habis, pangkat dan jabatan bisa lepas sewaktu-waktu.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

Terima kasih - Wassalamu'alaikum wr. wb

DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI KARYA INDONESIA SEJAHTERA

Ketua,


AGUS SUTRISNO

Sekretaris,


PUDJI SANTOSA, SP, MH



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG PADA ACARA
PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS HASIL
PEMBAHASAN RAPERDA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019**
Tanggal, 25 Juni 2020

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita semua

- Ykh. - Wakil Bupati Rembang
- Ykh. - Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forkopimda Kab.Rembang;
- Ykh. - Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Ykh. - Para Asisten Sekda, Kepala OPD dan Kepala Bagian Sekrerariat Daerah ;
- Ykh. - Para Ketua Partai Politik, Rekan-rekan Wartawan, LSM, dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur ***Alhamdulillah***, atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka **“Pendapat Akhir Bupati Atas Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 ”** dalam keadaan sehat wal’fiat.

Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPRD beserta unsur pimpinan, dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah menunjukkan keseriusannya, mengedepankan sikap arif dan bijaksana dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Berbagai dinamika dalam proses pembahasan telah kita lalui dengan semangat demokrasi, sinergi, dan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sehingga Rancangan Peraturan Daerah tersebut, hari ini telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semua tanggapan, apresiasi, kritik, saran, dan pendapat yang disampaikan masing-masing fraksi maupun Komisi DPRD selama pembahasan akan menjadi motivasi bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan terhadap masyarakat. Pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan mendorong kemandirian, dan pembangunan menciptakan kesejahteraan.

Rekomendasi-rekomendasi dan hasil evaluasi yang telah diberikan DPRD akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Terkait hal-hal yang perlu diperbaiki, kami akan memperbaikinya pada proses perencanaan dan pelaksanaan tahun berikutnya.

Sedangkan hal yang sudah baik kami akan mempertahankan, bahkan akan meningkatkan lagi, untuk mencapai visi kabupaten Rembang yaitu **“Terwujudnya masyarakat Rembang yang sejahtera, melalui peningkatan perekonomian dan sumber daya manusia, yang dilandasi semangat kebersamaan, pemberdayaan masyarakat dan kewirausahaan”**

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada hakekatnya merupakan laporan pelaksanaan tugas-tugas dan program yang sudah dikerjakan pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan gambaran umum melaksanakan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2019 dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rembang.

Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami atas nama Pemerintah Daerah dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua beserta seluruh pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Forkopimda, Kepala OPD, pimpinan partai politik, wartawan, LSM, dan seluruh masyarakat Kabupaten Rembang.

Kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai ini merupakan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, serta buah karya dan hasil kerja keras kita bersama.

Di penghujung pendapat akhir ini, saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kehadiran Allah SWT, karena sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019 dapat terlaksana dengan baik dan Pemerintah Kabupaten Rembang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua kalinya. Tentunya kita berharap, dan bertekad, agar setiap tahun kita selalu mendapatkan Opini WTP tersebut.

Demikian Pendapat Akhir atas hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang tahun Anggaran 2019, yang telah kita setuju bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan kepada kita dalam membangun Kabupaten Rembang yang Sejahtera.

Sekian, terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

BUPATI REMBANG

GP

H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I |



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah, dan rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Juni 2020;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2020;
3. Pembicaraan – pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KETIGA** : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2020.

Ketua,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang



H. MAJID KAMIL, MZ.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 25 Juni 2020;
2. Pendapat akhir Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2020;
3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 25 Juni 2020.

MEMUTUSKAN :

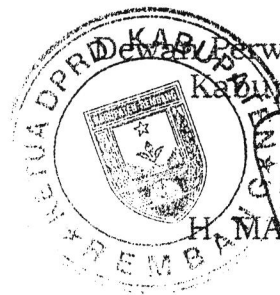
- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 beserta lampiran-lampirannya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini kepada Bupati Rembang;
- KETIGA** : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindaklanjuti;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 Juni 2020.

Ketua,

Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang

H. MAJID KAMIL, MZ.



(Handwritten initials and a number '2')



BERITA ACARA

NOMOR : 900 / 1282 / 2020

NOMOR : 900 / 18 / 2020

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pada Hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** .
2. H. MAJID KAMIL MZ : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
3. M. BISRI CHOLIL LAQUF : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. SUPRIYADI EKO PRAPTOMO,S.E : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. RIDWAN,S.H. M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Persetujuan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan terlampir berita acara ini;

2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini .

Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 25 Juni 2020

BUPATI REMBANG



H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

**KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



H. MAJID KAMIL MZ

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**

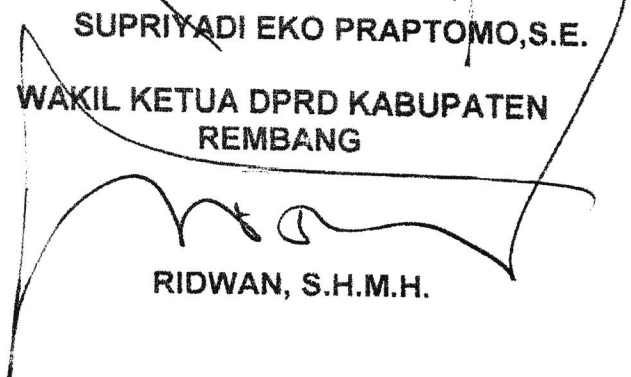
M. BISRI CHOLIL LAQUF

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.

**WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG**



RIDWAN, S.H.M.H.

